

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN, MANAJEMEN KEUANGAN DAN PARTISIPASI
ANGGARAN TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH**
(Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen

Disusun Oleh :

SUPRIYADI

NIM. 500001687

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

EFFECT OF UNDERSTANDING FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM, FINANCIAL MANAGEMENT AND BUDGET PARTICIPATION TO THE PERFORMANCE OF WORK UNIT DEVICE (Studies in Regional Secretariat Bungo)

Supriyadi
supri2705yadi@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

In certain situations understanding of the accounting system to be one of the technical constraints for executives in the financial management area, especially at the Regional Secretariat of Bungo. understanding of the accounting system, financial management at the Regional Secretariat Bungo needs to be done carefully in order to manyeleasakan problems of accounting and financial information presentation can perform adequately. Financial management is reflected in the budget has a strategic position in realizing management accountable government. That requires a reliable HR personnel in understanding and understanding of financial reporting.

This study aims to determine: Understanding the Influence of Financial Accounting System (X1) Performance Against Local Government Unit (Y), Effects of Financial Management (X2) Performance Against Local Government Unit (Y), Effect of Budget Participation (X3) Task Force on Performance Local Government (Y).

The population in this study the entire echelon II, III, IV and Employees (executor) Regional Governments Bungo as many as 233 people. Purposive sampling technique is a sampling technique based on certain characteristics that are considered to have a relationship with a known population characteristics beforehand so that in this study the sample set 53 people. To obtain an answer from the hypothesis that has been determined, the authors used a questionnaire. The questionnaire distributed to the entire study sample.

The results were obtained: 1) There is the influence of understanding of financial accounting system on the performance of local government unit. 2) There is the influence of the financial management of the performance of local government unit. 3) There is the effect of budget participation on the performance of local government unit. 4) understanding of financial accounting systems, financial management, budgetary participation, jointly affect the performance of regional work units.

Keywords: Regional Finance, Performance SKPDs

ABSTRAK

PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, MANAJEMEN KEUANGAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

Supriyadi
supri2705yadi@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Dalam situasi tertentu pemahaman sistem akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam manajemen keuangan daerah terutama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. pemahaman sistem akuntansi, manajemen keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo perlu dilakukan secara cermat agar dapat menyelesaikan problem akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi keuangan secara memadai. Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Untuk itu dibutuhkan tenaga SDM yang handal dalam memahami dan mengerti tentang pelaporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan (X_1) Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Y), Pengaruh Manajemen Keuangan (X_2) Terhadap Kinerja Satuan Kerja pemerintah Daerah (Y), Pengaruh Partisipasi Anggaran (X_3) Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Y).

Populasi dalam penelitian ini seluruh pejabat eselon II, III, IV dan Karyawan (pelaksana) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 233 orang. Teknik *purpose sampling* adalah teknik penarikan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya sehingga dalam penelitian ini sampel ditetapkan 53 orang. Untuk memperoleh jawaban dari Hipotesis yang telah ditentukan, penulis menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarakan kepada seluruh sample penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 1) Terdapat pengaruh dari pemahaman sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. 2) Terdapat pengaruh dari manajemen keuangan terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. 3) Terdapat pengaruh dari partisipasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. 4) pemahaman sistem akuntansi keuangan, manajemen keuangan, partisipasi anggaran, secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Keywords : Keuangan Daerah, Kinerja SKPD

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER MANAJEMEN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Manajemen Keuangan dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*Studi pada Sekretariat daerah Kabupaten Bungo*) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jambi, Desember 2014

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
3818CADF176129638

6000
ENAM RIBU RUPIAH


SUPRIYADI
NIM. 500001687

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA

01. Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021 7415050, Fax 021 7415588

Kejudo
Yth. Direktur PPs U.T.
01. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku pembimbing I/PMI dari Mahasiswa,

Nama NIM Supriyadi 500901687
Judul I/PMI Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Manajemen
Keuangan dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa I/PMI dari mahasiswa yang bersangkutan
sudah benar* selesai sekitar 92% sehingga dinyatakan **sudah layak uji/belum layak uji***
dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (I/PMI).

Demikian keterangan ini dibuat untuk meniadakan perselisihan.

Pembimbing I



(Dr. Syaparuddin, SE, MM)

Jambi, Oktober 2014
Pembimbing II

(Dr. I Nengah Baskara Wisnu Tedja, M.Fc)

*Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama : Supriyadi
 NIM : 500001687
 Program Studi : Magister Manajemen
 Judul TAPM : Pengaruh pemahaman sistem akuntansi
 Keuangan, manajemen keuangan dan partisipasi anggaran
 terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (studi pada
 Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Manajemen Keuangan Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Desember 2014

Waktu : Jam 10.00 s/d 12.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Nama : Dra. Hartinawati, M.Pd.

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, M.Si.

Pembimbing I

Nama : Dr. Syaparudin, SE. M.Si.

Pembimbing II

Nama : Dr. I.N. Baskara Wisnu Tedja, M.Ec.

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh pemahaman sistem akuntansi Keuangan manajemen keuangan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (studi pada Sekretariat daerah Kabupaten Bungo)

Penyusun TAPM : Supriyadi

NIM : 500001687


Program Studi : Magister Manajemen

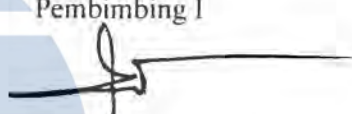
Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Desember 2014

Menyetujui :


Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. I.N. Baskara Wisnu Tedja M.Ec.
NIP. 19581110 198601 1 001


Dr. Svaparudin, SE. M.Si.
NIP. 196808271994031003

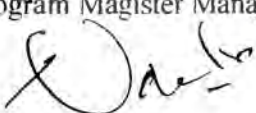
Penguji Ahli

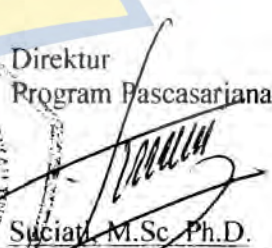

Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, M.Si.
NIP. 19591013 198601 2 003

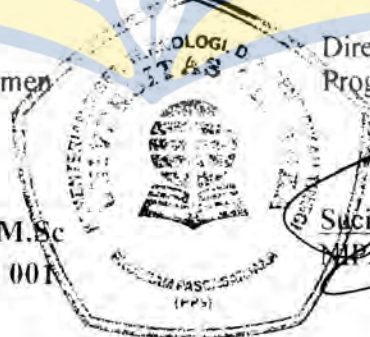
Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Manajemen

Direktur
Program Pascasarjana


Mohamad Nasoha, SE, M.Sc
NIP. 19781111 200501 1 001


Suciati, M.Sc, Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan TAPM dengan judul **“Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan, manajemen keuangan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (studi pada Sekretariat daerah Kabupaten Bungo)”**. Tujuan penyusunan penulisan TAPM ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka UPBJJ-UT Jambi.

Selain atas izin Allah, dalam penyusunan TAPM ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Bapak Dr. Syaparudin, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. I Nengah Baskara Wisnu Tedja, M.Ec. selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan dorongan dan bimbingan selama penyelesaian TAPM ini. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed. Ph.D., selaku Rektor Universitas Terbuka yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk dapat menyelesaikan TAPM ini.
2. Bapak Bupati Bungo yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk dapat menyelesaikan TAPM ini.

3. Ibu Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi saran perbaikan untuk penyempurnaan TAPM ini.
4. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
5. Ibu Maya Maria, SE., MM., selaku Ketua Bidang Ilmu Program Magister Manajemen Universitas Terbuka.
6. Seluruh Dosen dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Terbuka APBJJ-UT Jambi yang telah memberikan ilmu manajemen melalui suatu kegiatan belajar mengajar dengan dasar pemikiran yang analisis dan pengetahuan yang lebih baik.
7. Ketua, seluruh Staf Administrasi dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Terbuka UPBJJ-UT Jambi.
8. Seluruh Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo sebagai responden yang telah banyak memberikan sesuatu yang tak ternilai harganya.
9. Orang tua, istri dan anak-anak tercinta yang selalu memberi dukungan dan kekuatan.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen yang telah dapat meluangkan waktu untuk memberikan masukan yang bersifat konstruktif demi penyelesaian TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Mudah-mudahan TAPM ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jambi, Desember 2014

Penulis,

SUPRIYADI

RIWAYAT HIDUP

Nama : Supriyadi
NIM : 500001687
Program Studi : Magister Keuangan
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 27 Mei 1970
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Suka Agung Pada tahun 1984
Lulus SMP di Bahuga Pada tahun 1987
Lulus SMEA di Metro Pada tahun 1991
Lulus STIA di Muara Bungo pada tahun 2012
Riwayat Pekerjaan : - Tahun 1993 s/d 1995 Sebagai Pelaksana di Bagian Keuangan Setda Kab. Bungo
- Tahun 1995 s/d 1996 Sebagai Pelaksana di Bagian Urusan Kepegawaian Setda Kab. Bungo
- Tahun 1996 s/d sekarang sebagai Bendahara Pengeluaran di Bagian Keuangan Setda Kab. Bungo
No. Telp./HP : 0747-21059 / 08127469863
Alamat Email : supri2705yadi@gmail.com

Jambi, Desember 2014

Supriyadi
NIM . 500001687

DAFTAR ISI

		Halaman
	ABSTRAK	ii
	Pernyataan	iv
	Lembar Persetujuan	v
	Lembar Pengesahan	vi
	Lembar Persetujuan TAPM	vii
	Pengantar	viii
	Daftar Riwayat Hidup	x
	Daftar Isi	xi
	Daftar Tabel	xv
	Daftar Gambar	xii
	Daftar Lampiran	xvi
BAB	I PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Perumusan Masalah	10
	1.3. Tujuan Penelitian	10
	1.4. Kegunaan Penelitian	11
	1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA dan HIPOTESIS	13
	2.1. Landasan Teoritis.....	13
	2.1.1. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan	13
	2.1.2. Pengertian Sistem Akuntansi.....	15
	2.1.3. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah	19
	2.1.4. Manajemen Keuangan Daerah	21
	2.1.5. Partisipasi Anggaran	24
	2.1.6. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	28
	2.2. Penelitian Sebelumnya	30
	2.3. Kerangka Konseptual	34
	2.4. Hipotesis	34

BAB	III	METODE PENELITIAN	36
	3.1.	Desain Penelitian	36
	3.2.	Populasi dan Sampel	37
	3.3.	Jenis dan Sumber Penelitian	37
	3.4.	Operasional Variabel / Variabel Penelitian dan Pengukurannya	39
	3.4.1.	Pemahaman Sistem Akuntansi (X1)	39
	3.4.2.	Manajemen Keuangan (X2)	40
	3.4.3.	Partisipasi Anggaran (X3)	41
	3.4.4.	Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y)	41
	3.5.	Uji Instrumen	45
	3.5.1.	Uji Validitas	45
	3.5.2.	Uji Reliabilitas	45
	3.6.	<i>Methods Successive Interval</i> (MSI)	46
	3.7.	Teknik Analisa Data Hasil Penelitian	47
	3.7.1.	Analisis Deskriptif	47
	3.7.2.	Uji Asumsi Klasik	48
	3.7.3.	Analisa Regresi Linier Berganda	51
	3.7.3.1.	Uji Hipotesis	51
	3.7.3.2.	Rancangan Uji Hipotesis	53
BAB	IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	56
	4.1.	Gambaran Umum	56
	4.1.1.	Karakteristik Responden.....	63
	4.2.	Pembahasan	74
	4.2.1.	Hasil Uji Validitas antar Variabel.....	74
	4.2.2.	Hasil Uji Reliabilitas	82
	4.2.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	86
	4.2.4.	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Manajemen Keuangan Daerah, dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah	90
	4.2.5.	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah	92
	4.2.6.	Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah.....	94
	4.2.7.	Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah.....	96

BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN	99
		5.1. Kesimpulan	99
		5.2. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penetapan Kinerja	6
Tabel 2.1. Daftar Penelitian Sebelumnya	30
Tabel 3.1. Jumlah Responden	42
Tabel 3.2. Operasional Variabel Penelitian	46
Tabel 4.1. Pengelompokkan Responden Berdasarkan Usia	69
Tabel 4.2. Pengelompokkan Responden Berdasarkan Jenis Kieamin	70
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	71
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	73
Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	74
Tabel 4.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian	38
Gambar 4.1. Komposisi Responden Menurut Jenis Kelamin	70
Gambar 4.2. Komposisi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	72
Gambar 4.3. Komposisi Responden Menurut Jabatan	73
Gambar 4.4. Komposisi Responden Menurut Masa Kerja	75
Gamabr 4.5. Komposisi Responden Menurut Penghasilan	77



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner	109
Lampiran 2. Tabulasi Data	113
Lampiran 3. Printout Hasil Olah Data Menggunakan Eviews dan SPSS	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semangat otonomi daerah menimbulkan beberapa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, baik di bidang administrasi pemerintah maupun di bidang tata usaha keuangan Negara atau penatausahaan keuangan Negara, termasuk manajemen keuangan daerah. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri sebagai penyelenggara urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan salah satu tujuan pokok Undang-undang tersebut adalah mewujudkan sistem perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masyarakat dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Penegasan lain dalam Undang-undang tersebut adalah bahwa semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Untuk mempertegas undang - undang tersebut, turut diberlakukan tiga undang-undang dan satu peraturan pemerintah sebagai pilar utama

pengelolaan manajemen keuangan negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

Perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan akuntabilitas dan transparatasi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Zaki (2004: 27) menegaskan tuntutan public akan pemerintah yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Karakteristik yang menunjukkan perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi adalah perubahan system akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah pusat dan daerah yakni dituntutnya pelaksanaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah bukan hanya sekedar pembukuan semata seperti yang dilaksanakan selama ini (Halim, 2005:5).

Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku mengambil kebijakan untuk bertindak menuju ke

suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara (Suwardjono, 2005: 159). Salah satu tujuan ekonomik negara adalah alokasi sumberdaya ekonomik secara efisien sehingga sumber daya ekonomik yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal senada dikemukakan Hay (1997:4) bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah untuk :

- 1) menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial, serta menampilkan akuntabilitas dan *stewardship*;
- 2) menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam alokasi sumberdaya ekonomi harus diperuntukkan untuk kepentingan publik dan proses alokasi sumber tersebut harus dikontrol. Salah satu alat yang dapat mengontrolnya adalah teknik akuntansi. Sebagai alat kontrol dan alat pencapaian tujuan pemerintah, dari kacamata akuntansi khususnya system akuntansi keuangan dapat berperan sebagai pengendali dalam roda pemerintahan dalam manajemen keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku (Suwardjono, 2005 : 159). Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi akuntansi yaitu dengan cara memahami sistem akuntansi tersebut.

Dalam situasi tertentu pemahaman sistem akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam manajemen keuangan daerah.

Newkirk (1986:23) menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada dalam pemerintah daerah salah satunya adalah tentang pemahaman sistem akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa manajemen keuangan pada masing-masing satuan kerja perlu dilakukan secara cermat guna dapat menyelesaikan problem akuntansi dan dapat melakukan penyajian informasi keuangan secara memadai. Mardiasmo (2002:35) menegaskan bahwa system pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme manajemen keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan personil yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah.

Pengukuran kinerja tidak hanya sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun lebih dari itu. Penyusunan anggaran melibatkan berbagai pihak, baik pimpinan ataupun staf yang secara umum memainkan peranan yang aktif dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif dari tujuan anggaran sehingga komitmen pimpinan, staf dan pihak lain yang terkait di dalamnya dan akibatnya anggaran senantiasa digunakan sebagai tolok ukur kinerja manajerial. Hubungan antara partisipasi anggaran dalam mengukur kinerja manajerial telah dilakukan oleh supomo (1998) dengan

hasil partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Sedangkan Afifah (2000) mengambil sampel pada kantor/dinas di Sumatra Barat berkesimpulan bahwa partisipasi anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam menyusun anggaran, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (Permendagri No 21 Tahun 2011).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu : data internal, dan data eksternal. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator

sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo tahun 2013 dilaksanakan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (selanjutnya disebut PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (selanjutnya disebut PPS). Data tersebut dapat secara ringkas disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Penetapan Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk acara dan kegiatan	90% / 12 bulan	Program pelayanan administrasi perkantoran/ penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	129.900.000
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Tertibnya Administrasi Keuangan	90% / 12 bulan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Penyediaan Jasa Administasi Keuangan	299.632.500
Tersusunnya RKA dan DPA	Tersedianya RKA dan DPA	90% / 2 jenis	Program pelayanan Administrasi Perkantoran/ penyusunan Rencana Program/kegiatan	32.978.500
Tervujudnya pelayanan administrasi keuangan setda yang optimal	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	90% / 12 bulan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	298.602.500
Tertibnya administrasi pengelolaan dan pengendalian keuangan Setda	Pengelolaan dan Pengendalian Keuangan	90% / 12 bulan	Program pelayanan Administrasi Perkantoran/ penyusunan Rencana Program/kegiatan	79.888.900
Tertibnya administrasi pengendalian pertanggung jawaban keuangan Setda	Pengendalian pertanggung jawaban keuangan	90% / 12 bulan	Program pelayanan Administrasi Perkantoran/ penyusunan Rencana Program/kegiatan	30.995.800
Terpenuhi kendaraan dinas/Operasional pemerintah Kabupaten Bungo	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas /operasional pemerintah Kab. Bungo	90% / 2 unit kendaraan	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	676.105.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	90% / 269 stel	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Daerah	283.880.000
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang handal	Terlaksananya BinteK Implementasi Peraturan Undang-undang.	92% / 15 orang	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	145.423.350
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pegawai	Terlaksananya pendidikan / Pelatihan kursus	92% / 15 orang	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120.000.000
Tersedianya bahan laporan keuangan kegiatan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	90% / 2 laporan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.817.000
Terwujudnya tertib administrasi laporan keuangan akhir tahun setda dan KDH. Wakil KDH.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	90% / 33 buku	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.413.500
Mewujudkan ketersediaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pemerintahan dan pembangunan	Tersebarinya informasi tentang pelaksanaan program pembangunan daerah dan meningkatnya kualitas pelaporan	90% / 22 kali	Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah	61.240.500
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kepada aparatur daerah setiap SKPD dalam Kab. Bungo agar lebih memahami dan mempunyai nilai tambah terhadap penetapan Kinerja	Melaksanakan Kegiatan sosialisasi Penetapan Kinerja untuk seluruh SKPD dalam Kabupaten Bungo	90% / 1 Kegiatan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	81.047.500
Tersedianya bahan dan pedoman pelaksanaan analisis jabatan pegawai dan analisis beban kerja	menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja	90% / 12 bulan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	33.974.000
Tersedianya laporan kinerja lembaga daerah	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja lembaga daerah	90% / 5 laporan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	53.043.500
Tertatanya aset Sekretariat Daerah	Terlaksananya penataan Aset Sekretariat daerah	90% / 1 dokumen	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan SKPD	29.087.000

Sumber : Lakip Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

Motivasi dilakukan penelitian ini adalah : (1) adanya regulasi yang memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan

memanfaatkan potensi daerah secara maksimal: (2) Dari sisi kelembagaan pengamatan terhadap organisasi sector publik relative lebih luas dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi komersial, khusus untuk kondisi Indonesia penelitian di bidang akuntansi sektor publik, terutama yang berkaitan dengan akuntansi atau manajemen keuangan daerah sangat terbatas: (3) Secara umum organisasi pemerintah berada dalam pasar monopolistik atau quasi monopolistik (Miah, N.Z 1996:173): (4) Masih terdapat beberapa kesulitan dalam pengukuran kinerja, padahal pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Lin et. al. (1993 :235) menegaskan bahwa pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang vital. (5) Dana yang digunakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik secara periodik.

Karena terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Demikian pula dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo selaku Perangkat Daerah yang memiliki fungsi koordinasi, penyusunan kebijakan daerah, pembinaan pemantauan, dan evaluasi perangkat daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagaimana yang telah dijabarkan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diwujudkan apabila mampu mengelola secara baik seluruh sumber daya yang dimiliki.

Oleh sebab itu melalui penentuan aktivitas dan pelaksanaannya Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dapat dilihat dari pengukuran

kinerjanya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Namun dalam pelaksanaannya kinerja pegawai sering kali dipertanyakan, mengenai masalah penempatan kerja serta penetapan dan penempatan pegawai dalam jabatan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga masih terdapatnya beberapa pegawai yang tidak dapat menguasai pekerjaan dan penggunaan peralatan kantor. Selain itu pula masih ditemukan beberapa pegawai yang kurang memahami proses kerja secara teknis sehingga terjadi berbagai kesalahan dan keterlambatan proses kerja. Sejalan dengan hal tersebut keterlambatan pembuatan laporan keuangan secara bertahap juga menghambat proses kerja yang seharusnya sudah diselesaikan sebelum tutup buku di akhir tahun.

Mengacu pada penjelasan di atas, penting untuk dikaji lebih mendalam dengan penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Manajemen Keuangan dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo*)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan terhadap Kinerja satuan kerja perangkat daerah?
2. Bagaimanakah pengaruh manajemen keuangan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?
3. Bagaimanakah pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?
4. Bagaimanakah pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan, manajemen keuangan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris :

1. Untuk menganalisis Pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
2. Untuk menganalisis Pengaruh manajemen keuangan terhadap satuan kerja perangkat daerah.
3. Untuk menganalisis Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

4. Untuk menganalisis pemahaman sistem akuntansi keuangan, manajemen keuangan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

B. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam mempraktekan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah di pascasarjana.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan yang berguna dalam menentukan kebijaksanaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, khususnya Satuan Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, sebagai bahan acuan dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi kedalam lima bab yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis data kesimpulan, keterbatasan dan saran. Setiap bab akan dijelaskan secara garis besar sebagai berikut :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pemanfaatan penelitian dan sistematika penulisan.

- Bab II : Merupakan landasan teoritis yang menyajikan penawaran umum kinerja satuan kerja perangkat daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu pemahaman system akuntansi, manajemen Keuangan dan partisipasi anggaran dan penelitian terdahulu serta hipotesis.
- Bab III : Merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian yang berisikan data, sampel yang digunakan, operasional variabel/variabel penelitian, pengukuran variabel, Uji instrumen penelitian.
- Bab IV : Menyajikan hasil penelitian. Bab ini membahas deskripsi statistik sampel dan diagnosa model yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, pengujian hipotesis serta analisis dan pembahasan hasil penelitian secara lebih luas dan mendalam.
- Bab V : Memberikan kesimpulan dari analisis-analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikutnya juga mengemukakan keterbatasan penelitian dan saran (rekomendasi) yang dapat dilakukan bagi Penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teoritis

Landasan teoritis ini ditinjau dari faktor yang mempengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah yaitu pemahaman sistem akuntansi, manajemen keuangan dan partisipasi anggaran, sebagai berikut :

2.1.1 Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2003:811) dinyatakan bahwa pemahaman merupakan suatu proses, cara untuk memahami (mengerti atau mengetahui benar) atau memahamkan. Demikian pula dalam kamus Webster's New World Colledge Dictionary (1999:1445), dinyatakan bahwa pemahaman (*understanding*) merupakan pengetahuan yang komprehensif, jelas dan menyeluruh tentang karakter, fungsi, sifat dan sebagainya. Sementara menurut kamus besar ilmu pengetahuan dinyatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang yang memiliki intuisi yang sangat tajam atau merupakan proses untuk menjadi tahu. Dari sudut pandang ilmu psikologi, Dagung (2000:575) menegaskan bahwa pemahaman merupakan pemecahan masalah secara tiba-tiba tanpa terlebih dahulu menegaskan bahwa pemahaman merupakan pemecahan masalah secara tiba-tiba tanpa terlebih dahulu melewati upaya *trial and error*.

Mengacu pada pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan suatu proses untuk mengetahui fungsi, sifat fungsi, sifat karakter secara komprehensif tanpa melewati upaya trial and error. Dengan demikian dalam konteks manajemen keuangan untuk mengetahui atau memahami sistem akuntansi perlu direspon oleh pengelola keuangan agar dapat melaksanakan pekerjaan di bidang keuangan dan akuntansi dengan baik.

Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan. Menurut Accounting Principles Board (1970: Nomor 4) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Sedangkan menurut American Accounting Assosiation (1996) dalam Abdul (2005) menegaskan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, perencanaan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan oleh pihak yang memerlukan. Mengacu pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi sebagai penyedia jasa informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak yang memerlukan.

Untuk dapat berperan dalam proses alokasi sumber daya negara akuntansi perlu berperan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan alokasi sumber daya. Granof (2001: 4-5) menegaskan bahwa sistem akuntansi harus dapat menjadi suatu media yang dapat digunakan untuk menilai, membandingkan berbagai laporan organisasi, baik menyangkut pendapatan maupun pengeluaran yang konsisten dengan

anggaran yang ditetapkan. Lebih lanjut Granof menegaskan bahwa saat ini hanya sedikit organisasi pemerintah dan non profit yang menerapkan sistem akuntansi dan anggaran untuk menyajikan laporan dan pengukuran yang cukup terkait dengan aspek-aspek moneter untuk menilai kinerja.

Akuntansi yang diselenggarakan untuk menghasilkan informasi kepada pihak eksternal disebut juga dengan akuntansi keuangan sedangkan akuntansi yang memfokuskan diri pada penyajian laporan untuk tujuan pengambilan keputusan intern organisasi disebut akuntansi manajemen. Miller et.al (1985:5) menyatakan ada tiga kelompok orang yang berpartisipasi dalam akuntansi keuangan yaitu pengguna (*users*), penyaji (*preparers*), dan auditor (*auditors*). Pengguna adalah individu atau institusi yang mengandalkan informasi akuntansi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi atau kredit. Dalam kelompok ini termasuk investor, kreditor, analis keuangan dll. Penyaji adalah pihak yang menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yaitu manajemen. Auditor adalah pihak yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk menyatakan pendapat atas kewajarannya.

2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi

Suatu perusahaan memerlukan suatu informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen dan dalam pengambilan keputusan agar memungkinkan mereka mengalokasikan berbagai sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif. Sistem akuntansi memudahkan dalam pengelolaan data akuntansi sejak data direkam dalam dokumen melalui berbagai sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi perusahaan, data

keuangan diproses dalam berbagai catatan akuntansi, sampai dengan informasi disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam rangka mengetahui arti penting sistem akuntansi, maka kita harus memahami pengertian dan fungsi sistem akuntansi menurut pendapat beberapa ahli. Pengertian tentang sistem akuntansi Menurut Mulyadi (2008: 3), “didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. Dokumen-dokumen seperti formulir, catatan, dan laporan tersebut diolah melalui prosedur yang ditentukan guna menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membantu menjalankan kegiatan perusahaan. Pendapat lain dari Baridwan (2007: 3) mendefinisikan sistem akuntansi adalah “suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pembuat keputusan yang relevan kepada pihak ekstern dan intern perusahaan”.

Pengertian sistem akuntansi menurut George H. Bodnar (2003: 181) menyatakan bahwa : “sistem akuntansi merupakan metode dan catatan-catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang bersangkutan”. Dalam hal ini sistem akuntansi merupakan suatu metode atau cara untuk mencatat, menganalisis, serta melaporkan segala transaksi organisasi dan mempertanggungjawabkan aktiva serta kewajiban yang

bersangkutan. Suatu sistem yang ada adalah pengelolaan jaringan informasi untuk memudahkan pengelolaan perusahaan, hal ini ditegaskan dalam pengertian sistem akuntansi menurut Narko (2007:3), menyatakan : “sistem akuntansi pada umumnya diartikan sebagai jaringan yang terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat, dan sumber daya manusia dalam rangka menghasilkan informasi pada suatu organisasi untuk keperluan pengawasan, operasi, maupun untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.” Dalam hal ini jaringan akuntansi seperti formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat, dan sumber daya manusia akan menghasilkan suatu informasi yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan.

Fungsi utama sistem akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar sistem tersebut dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dilakukan pengolahan data mulai dari awal transaksi sampai dengan pelaporan yang dapat dijadikan sebagai informasi akuntansi. Dalam suatu sistem akuntansi, terdapat unsur-unsur pokok, seperti dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2007:3) adalah :

- a) Formulir
- b) Jurnal
- c) Buku besar

- d) Buku pembantu
- e) Laporan.

Dalam mewujudkan sistem akuntansi yang baik, pada dasarnya harus mengetahui pembangun sistem akuntansi itu sendiri, sistem akuntansi erat hubungannya dengan kerjasama manusia dengan sumber daya lainnya di dalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Tujuan sistem akuntansi merupakan suatu tujuan yang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dari setiap sistem akuntansi yang terdiri dari berbagai sistem mempunyai tujuan yang sama, sistem akuntansi sendiri dibuat oleh manajemen dalam mengelola perusahaannya, maka dari itu untuk lebih jelasnya, tujuan sistem akuntansi dapat dikemukakan dibawah ini. Tujuan sistem akuntansi yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2007:20) adalah :

- a) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru
- b) Untuk meningkatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya
- c) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi, dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan

- d) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.”

Berdasarkan uraian tujuan sistem akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terstruktur dan mengandung arti. Dengan demikian sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan. Sistem akuntansi membutuhkan suatu proses penyusunan laporan selanjutnya yang akan digunakan sebagai alat komunikasi untuk keperluan manajemen, baik keperluan intern maupun keperluan ekstern perusahaan. Pihak intern perusahaan memanfaatkan sistem akuntansi beserta hasil-hasilnya sebagai sarana manajemen dibidang perencanaan dan pengendalian, sedangkan pihak ekstern yang memiliki kepentingan umum meminta pertanggungjawaban perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan sistem akuntansi.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bentuk tata usaha dalam manajemen keuangan daerah selain tata usaha umum atau administrasi. Dari sudut manajemen keuangan pengertian akuntansi keuangan daerah dilihat dari dua sudut. Menurut Abdul (2005: 25) pengertian pertama mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah sehingga akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai tata usaha keuangan atau tata buku. Pengertian kedua mengacu pada

kegiatan penyediaan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak eksternal dari pemerintah daerah. Pengertian kedua inilah yang lebih mencerminkan definisi akuntansi karena tidak membatasi akuntansi hanya sebagai kegiatan administratif (yang tercermin dari istilah tata buku), namun menuntut adanya sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan bagi pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah daerah adalah akuntansi keuangan daerah.

Secara umum akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan laporan transaksi ekonomi (keuangan) dari pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 232 ayat (3) menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang

mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Pihak eksternal Pemerintah Daerah yang membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), investor, kreditur dan donator, rakyat, analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, pemerintah daerah lain, pemerintah pusat dan semua yang ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

2.1.4 Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan adalah manajemen yang membahas kegiatan-kegiatan berdasarkan fungsinya, pada intinya manajemen keuangan berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus mampu mencapai tujuannya secara ekonomis yaitu diukur berdasarkan profit. Fungsi Keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (*raising of fund*) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (*allocation of fund*). Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan diperoleh, dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu:

- a) Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva.

- b) Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.
- c) Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin.

Berikut ini adalah fungsi Manajemen Keuangan:

- a) Perencanaan Keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
- b) Penganggaran Keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
- c) Pengelolaan Keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
- d) Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksplorasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
- e) Penyimpanan Keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut.
- f) Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.
- g) Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
- h) Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi

Tugas pokok manajemen keuangan adalah berupa keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden. Keputusan investasi akan tercermin dari pada sisi aktiva perusahaan akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, keputusan pendanaan, dan kebijakan deviden akan tercermin pada sisi pasiva perusahaan, akan mempengaruhi struktur modal (Husnan, 2006). Suatu kombinasi yang optimal atas ketiganya akan memaksimalkan nilai perusahaan yang selanjutnya meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham. Keputusan-keputusan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga kita harus memperhatikan dampak bersama ketiganya.

Diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat secara luas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 pasal 4 ayat (1), yakni pengelolaan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Edward (1992:13) menyatakan manajemen keuangan dapat dilakukan dengan baik jika pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara jelas tujuan dari manajemen keuangan daerah. Hal ini menandakan bahwa bila pemerintah daerah secara jelas dapat mendefinisikan atau merumuskan tujuan pengelolaan keuangan daerah. Anggaran memiliki potensi penyimpangan atau penyalahgunaan yang cukup tinggi, karena berkaitan dengan pengelolaan asset daerah dalam bentuk keuangan daerah. Dikatakan memiliki potensi penyimpangan tinggi karena struktur dan bentuk APBD saat ini jauh berbeda dengan struktur dan bentuk APBD sebelum implementasi peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Di samping itu, anggota dewan memiliki kewenangan yang cukup luas dalam penyusunan dan penetapan APBD, sebagaimana dinyatakan dalam kedua Undang-undang tersebut, yaitu penyusunan maupun revisi APBD harus mendapat persetujuan dari DPRD. Konsekuensi dari aturan ini menunjukkan adanya kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan menghendaki adanya bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan setiap rupiah selama satu periode tahun anggaran.

2.1.5 Partisipasi Anggaran

Anggaran adalah salah satu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, yang akan digunakan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut (Hanson, 1996). Anggaran digunakan sebagai arahan atau pedoman kerja bagi manajer untuk mencapai target perusahaan sehingga diharapkan anggaran dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi pada setiap operasional perusahaan.

Menurut Machfoed (1993:5) pengertian anggaran adalah suatu rencana yang terkoordinasi, menyeluruh dan dinyatakan dalam suatu uang, mengenai kegiatan operasi dan penggunaan sumber-sumber daya perusahaan untuk periode tertentu dimasa yang akan datang. Sedangkan menurut M. Munandar (1997:1) dalam bukunya yang berjudul *Budgeting*, pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”.

Case (2002:429) menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana tindakan yang disiapkan untuk menggunakan sumber daya keuangan oleh pemerintah sesuai fungsi dan tujuan yang akan dicapai. Hogue (2002:12) menegaskan bahwa anggaran yang disusun harus akuntabel dan mencerminkan salah satu instrument kunci aktivitas pemerintah yang transparan. Lebih lanjut Hogue menegaskan instrument yang digunakan dalam penyusunan anggaran antara satu dengan negara lain berbeda-beda. Freeman et al, (2004.74) menegaskan bahwa desain sistem anggaran pemerintah harus fit dengan faktor-faktor yang ada. Kearns (1993:40) menegaskan terdapat sejumlah faktor tertentu yang

berpengaruh signifikan terhadap penentuan anggaran periodik (APBD), misalnya frekuensi sidang DPRD, budaya politik, pengeluaran, dan pendapatan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa setiap pengeluaran pemerintah harus dipertimbangkan dampak lanjut dari pengeluaran tersebut, bukan pengeluaran yang didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu. Hal ini menjadi pertimbangan penting karena anggaran sangat erat kaitannya dengan aspek perilaku pengelola keuangan.

Menurut Robert Anthony, J. Dearden, N.M. Beedford (1993:44) terjemahaan Agus Maulana mengemukakan anggaran adalah rencana manajemen, yang penyusunan anggarannya mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Sedangkan Mulyadi (2007:488) mengemukakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja yang direncanakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar, biasanya dalam satuan uang untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Selain itu juga dapat dikemukakan ciri-ciri dari suatu anggaran yang dilihat dari pengertian di atas adalah:

1. Dinyatakan dalam satuan uang
2. Dinilai dan disetujui oleh atasan yang punya wewenang yang lebih tinggi dari penyusunan.
3. Mencakup kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun.
4. Setelah disahkan tidak boleh dirubah kecuali dalam hal khusus.
5. Isinya adalah komitmen dalam manajemen.

6. Dilakukan perbandingan dalam realisasinya serta menganalisa terhadap penyimpangan yang terjadi.

Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses operasional dimana para anggota organisasi ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam suatu pembuatan keputusan yang berkepentingan dengan mereka. Partisipasi dalam konteks penyusunan anggaran merupakan proses dimana para individu, yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian anggaran, ikut serta dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan anggaran.

Seperti yang dikemukakan Milani (1975), bahwa tingkat keikutsertaan dan pengaruh bawahan terhadap pembuatan keputusan dalam proses penyusunan anggaran merupakan faktor utama yang membedakan antara anggaran partisipasi dengan anggaran non partisipasi. Aspirasi bawahan lebih diperhatikan dalam proses penyusunan anggaran, sehingga lebih memungkinkan bagi bawahan melakukan negosiasi dengan atasan mengenai target anggaran yang menurut mereka dapat dicapai. Selain itu, partisipasi anggaran didefinisikan sebagai keterlibatan manajermanajer pusat pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran (Govindarajan, 1986). Menurut Kenis (1979) partisipasi anggaran adalah tingkat partisipasi manajer dalam mempersiapkan anggaran dan mempengaruhi dalam menentukan pencapaian tujuan di pusat pertanggungjawaban.

Partisipasi penyusunan anggaran terutama dilakukan oleh manajer tingkat menengah yang memegang pusat-pusat pertanggungjawaban dalam

proses penyusunan dan penentuan sasaran anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Diikutkannya manajer dalam penyusunan anggaran, maka akan menambah informasi bagi atasan mengenai lingkungan yang sedang dan yang akan dihadapi, serta membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anggaran. Partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran akan menimbulkan inisiatif bagi mereka untuk menyumbangkan ide dan informasi. Meningkatkan informasi, meningkatkan kebersamaan, dan merasa memiliki, sehingga kerjasama diantara anggota dalam mencapai tujuan juga ikut meningkat. Disamping itu partisipasi dapat mengurangi tekanan dan kegelisahan para bawahan, karena mereka dapat mengetahui suatu tujuan yang relevan, dapat diterima dan dapat dicapai. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran merupakan suatu cara efektif untuk menciptakan keselarasan tujuan setiap pusat pertanggungjawaban dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh.

2.1.6 Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja memiliki peranan yang signifikan pengendalian internal atau manajerial, guna menjamin bahwa organisasi dapat dikelola sesuai dengan keinginan semua stakeholders. Untuk menilai atau mengevaluasi kinerja suatu institusi harus dapat diukur kinerja tersebut. Mwita (2000:3) menegaskan jika kita tidak dapat mendefinisikan kinerja, kita tidak dapat mengukur dan mengelolanya. Lin (1993:17) menegaskan pengukuran dan penilaian kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan comparability informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting. Evaluasi kinerja merupakan

penilaian terhadap efektivitas operasional organisasi, sub unit organisasi, dan personil organisasi secara periodik berdasarkan tujuan, standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laurensius dan Abdul Halim (2005:774) menegaskan pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kimisean dkk (2004:490) menegaskan kinerja pelayanan suatu organisasi merupakan hal penting untuk dicermati supaya dapat mengukur suatu keberhasilan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya, sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan suatu organisasi dicapai. Tujuan pengukuran kinerja pemerintah daerah adalah untuk memotivasi pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya khususnya dalam merealisasikan good governance serta memberikan pelayanan publik.

Herbert et. Al (1984:75) menegaskan bahwa sebagian besar dana pemerintah dapat dikontrol melalui pendapatan dan pengeluaran, atau melalui anggaran yang dapat dibandingkan. Uraian tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dikemukakan hasil yang dicapai, serta untuk mengukur kinerja dapat digunakan berbagai indikator. Dalam hal ini pengukuran kinerja tidak dipandang sebagai suatu mekanisme dalam memberi penghargaan atau hukuman, tetapi berperan sebagai alat komunikasi dalam memperbaiki kinerja organisasi dimasa depan.

Dalam kaitannya dengan kinerja pelayanan public Thoha (2002:14) menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus

mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan keputusan kepada publik. Demikian pula Munir dkk (1995:21) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan fungsi material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Kimisean dkk (2004:491) mengungkapkan bahwa tiga konsep yang biasa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik/organisasi non bisnis, yakni responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, banyak indikator yang dapat digunakan yaitu: (1) produktivitas: (2) kualitas layanan: (3) responsivitas: (4) responsibilitas: dan (5) akuntabilitas.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Sebelumnya

No.	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lin (1998)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	pengukuran kondisi keuangan daerah dalam bentuk pengeluaran daerah dapat menggunakan akuntansi pemerintah daerah. Pengeluaran daerah merupakan akumulasi dan alokasi sumber daya daerah, maka diperlukan sistem untuk

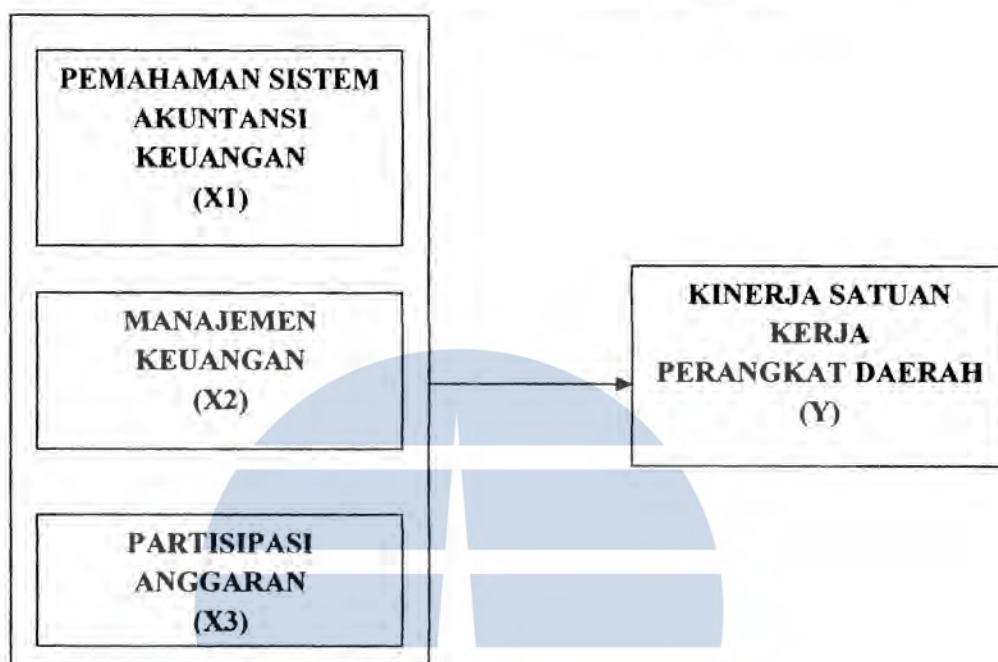
No.	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			mengevaluasi proses alokasi tersebut
2	Louise (1999:3)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	menegaskan bahwa sistem akuntansi dapat digunakan untuk mengukur kinerja, karena sistem akuntansi mempertimbangkan reliabilitas dan konsistensi, serta dapat dihubungkan dengan kepentingan utama pemilik dalam meningkatkan profit. Bila dikaitkan dengan organisasi pemerintah daerah pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah termasuk satuan kerja.
3	Askam Tuasikal (2006)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	pemahaman sistem akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah
4	Anthony & Govindrajan (2003)	Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja	anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada

No.	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Perangkat Daerah	<p>setiap level organisasi. Keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran khususnya dalam anggaran sektor publik diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan setiap personil yang kompeten pada setiap level organisasi dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dalam konteks manajemen keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja.</p>
5	Michael, dan Troy (2000)	Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	menjelaskan untuk mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal dalam perbandingannya dengan tujuan-tujuan yang telah

No.	Nama/Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			ditetapkan maka diperlukan akuntabel oleh pemerintah local
6	Ririn dan Mardiasmo (2004)	Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajer instansi pemerintah.
7	Muthaher (2007)	Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.
8	Indriantoro (1993) dan Purwanto (2009)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian dari Bab terdahulu terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap ketiga variable X1, X2, dan X3 tersebut di atas, akan dilakukan penelitian dan analisis terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah, dengan maksud untuk memperoleh pembuktian dari hipotesis “adakah pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan, manajemen keuangan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo”.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan beberapa asumsi yang telah dikemukakan terdahulu dapat dirumuskan hipotesis yang merupakan dugaan

sementara. Penulis merumuskan hipotesis berkenaan dengan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Pemahaman Sistem Akuntansi diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Manajemen Keuangan diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Partisipasi Anggaran diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Pemahaman Sistem Akuntansi, Manajemen Keuangan, dan Partisipasi Anggaran secara bersama-sama diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono metode penelitian merupakan cara ilmiah yang di gunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan yang dilandasi metode keilmuan dan diharapkan data yang akan di dapat merupakan data yang obyektif, valid dan reliable. Obyektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama, valid yakni ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang terjadi pada objek yang sesungguhnya, Reliable yaitu data yang didapat konsisten dari waktu ke waktu. Kirlk dan Meller mendefenisikan penelitian kuantitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan maksud untuk mengetahui cara mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dengan pendekatan kuantitatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang akan diteliti yang mana memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pejabat eselon dua, tiga, dan empat serta pelaksana/staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo yang berjumlah 233 orang.

Adapun jumlah sampel yang ditentukan oleh peneliti sebanyak 53 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purpose sampling*. Teknik *purpose sampling* adalah teknik penarikan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian kuesioner disebarakan kepada seluruh sampel penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer. Untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 53 responden. Untuk lebih jelas dibawah ini disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.1
Jumlah Responden

No	Unit Satuan Kerja	Es II	Es. III	Es IV	Non Eselon	Jmlh
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	-	-	-	1
3	Asisten Akonomi dan Pembangunan	1	-	-	-	1
4	Asisten Administrasi Umum	1	-	-	-	1
5	Staf Ahli Bupati	3	-	-	-	3
6	Bagian Adm Pemerintahan Umum	-	1	3	-	4
7	Bagian Adm Kesramasy	-	1	3	-	4
8	Bagian Adm Pembangunan dan Keuangan	-	1	3	-	4
9	Bagian Adm Sumber Daya Alam	-	1	3	-	4
10	Bagian Adm Perekonomian	-	1	3	-	4
11	Bagian Hukum	-	1	3	-	4
12	Bagian Organisasi	-	1	3	-	4
13	Bagian Umum	-	1	3	-	4
14	Bagian Humas	-	1	3	-	4
15	Bendahara Penerimaan	-	-	-	1	1
16	Bend.Peng.Pembantu Bag Adm Pemerintahan Umum	-	-	-	1	1
17	Bend Peng Pembantu Bag Adm Kesramasy	-	-	-	1	1
18	Bend Peng Pembantu Bag Adm Pemb dan Keu	-	-	-	1	1
19	Bend Peng Pembantu Bag Adm Sumber Daya Alam	-	-	-	1	1
20	Bend Peng Pembantu Bag Adm Perekonomian	-	-	-	1	1
21	Bend Peng Pembantu Bag Hukum	-	-	-	1	1
22	Bend Peng Pembantu Bag Organisasi	-	-	-	1	1
23	Bend Peng Pembantu Bag Umum	-	-	-	1	1
24	Bend Peng Pembantu Bag Humas	-	-	-	1	1
	JUMLAH KESELURUHAN	7	9	27	10	53

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo 2014 sudah diolah

3.4 Oprasionalisasi Variabel / Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Untuk mempermudah pemahaman atas variabel-variabel yang diasosiasikan, setiap variabel dirumuskan dalam bentuk simbol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemahaman mengenai Sistem Akuntansi (X_1), Manajemen Keuangan (X_2) dan Partisipasi Anggaran (X_3). Dan variabel dependennya adalah kinerja unit satuan kerja perangkat daerah (Y). Kinerja satuan kerja perangkat daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja pelayanan publik. Untuk lebih jelas berikut diuraikan pengertian dari masing-masing variabel yang diteliti.

3.4.1 Pemahaman Sistem Akuntansi (X_1).

Sistem Akuntansi Keuangan adalah sistem yang bertujuan memenuhi kewajiban pemerintah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah bersangkutan Ihya ulum (2004:243). Sedangkan Akuntansi keuangan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu secara prosedur tertentu yang menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan. (Halim,2004:1). Indikator dari variabel tersebut adalah:

- a) Pengidentifikasian
- b) Pengukuran
- c) Pencatatan
- d) Penyajian Pelaporan Keuangan
- e) Aktivitas di bidang anggaran dan akuntansi
- f) Kemampuan penyajian informasi keuangan
- g) Pelatihan di bidang akuntansi dan anggaran

3.4.2 Manajemen Keuangan (X₂).

Manajemen Keuangan adalah cara mengatur pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang berada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut (Halim,2004:20). Dalam penelitian ini manajemen keuangan dirumuskan dalam tiga dimensi, yaitu penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan. Indikator dari variabel tersebut adalah:

- a) Arah dan kebijakan umum APBD
- b) Rapat koordinasi
- c) Renstra dan dokumen pendukung
- d) Usulan kegiatan dan program sesuai RKA-SKPD
- e) Strategi dan prioritas APBD sebagai acuan RKA-SKPD
- f) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
- g) Agenda pembahasan APBD
- h) Sosialisasi rancangan Perda APBD
- i) Waktu penetapan dan dokumen RKA
- j) Penetapan Anggaran sesuai kemampuan dan rencana Pemerintah Daerah
- k) Pengguna anggaran bertanggung jawab atas tata usaha anggaran
- l) Pemisahan antara tata usaha keuangan dengan tata usaha barang daerah
- m) Pengeluaran dikoordinasikan dengan pengguna anggaran
- n) Pengeluaran yang membebani APBD dilakukan setelah APBD ditetapkan

- o) Penggunaan anggaran sesuai penetapan

3.4.3 Partisipasi Anggaran (X_3)

Partisipasi Anggaran adalah Keterlibatan pimpinan pertanggung jawaban dalam Penyusunan Anggaran (Govindarajan, 1986). Dalam partisipasi anggaran individu mempunyai pengaruh untuk menyusun target anggaran yang akan dicapai. Indikator dari variabel tersebut adalah:

- a) Penyusunan Anggaran
- b) Revisi Anggaran
- c) Pendapat/Opini
- d) Kontribusi

3.4.4 Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y).

Kinerja satuan kerja perangkat daerah yang dimaksud dalam penelitian adalah kinerja pelayanan publik. Tjandra dkk, (2005:3) dan Kurniawan, (2005:10) menunjukkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alasan menggunakan pengukuran atau proksi ini adalah : *Pertama*, fungsi negara adalah menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat, melakukan pelayanan baik produksi maupun distribusi yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan atas warga dan pemberi pelayanan yang kurang memuaskan (Wulan, 2005:760). Kedua, salah satu tujuan dari manajemen keuangan adalah pelayanan publik, meliputi pelayanan administrasi antara terpenuhinya kewajiban masyarakat sebagai wajib

pajak dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang memadai perlu menjadi perhatian (M.Safar dkk,2004:28). Indikator dari variabel tersebut adalah:

- a) keadilan dan pemerataan pelayanan
- b) kesederhanaan prosedur pelayanan
- c) keamanan dan kenyamanan
- d) keterbukaan dan pelayanan publik
- e) ketepatan waktu pelayanan
- f) kejelasan dan kepastian pelayanan
- g) pertanggungjawaban setiap unit layanan
- h) produk pelayanan publik yang efektif dan efisien
- i) produk pelayanan sesuai keinginan dan kebutuhan publik
- j) produk pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah

Untuk lebih jelas di bawah ini disajikan dalam tabel.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Ukuran Skala Likert	Ket. Nilai
1.	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan(X_1)	<ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas - mengidentifikasi sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas - sistem dan prosedur akuntansi aset tetap - Kemampuan penyajian informasi keuangan - Penyajian sistem 	Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju	5 4 3 2 1

No	Variabel	Indikator	Ukuran Skala Likert	Ket. Nilai
2.	Manajemen Keuangan (X ₂)	<ul style="list-style-type: none"> akuntansi secara akrual - Pelatihan di bidang akuntansi dan anggaran - Arah dan kebijakan umum APBD - Renstra dan dokumen pendukung - Usulan kegiatan dan program sesuai RKA-SKPD - Strategi dan prioritas APBD sebagai acuan RKA-SKPD - Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) - Agenda pembahasan APBD - Sosialisasi rancangan perda APBD - Waktu penetapan dan dokumen RASK - Penetapan anggaran sesuai kemampuan dan rencana Pemerintah Daerah - Pengguna anggaran bertanggung jawab atas tata usaha anggaran - Pemisahan atas tata usaha keuangan dengan tata usaha barang daerah - Pengeluaran dikoordinasikan dengan pengguna anggaran - Pengeluaran yang membebani APBD dilakukan setelah 	Sangat Setuju Setuju Netral Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju	5 4 3 2 1

No	Variabel	Indikator	Ukuran Skala Likert	Ket. Nilai
3.	Partisipasi Anggaran (X ₃)	<p>APBD ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan anggaran sesuai penetapan - Penyusunan anggaran - Revisi Anggaran - Pendapat/Opini - Kontribusi 	<p>Sangat Setuju</p> <p>Setuju</p> <p>Netral</p> <p>Tidak Setuju</p> <p>Sangat Tidak Setuju</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>
4.	Kinerja (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan dan Merencanakan tujuan, kebijakan, penjadwalan kerja, penganggaran dan pemrograman - Sharing Informasi dengan di bagian organisasi lain untuk menyesuaikan program: memberitahu SKPD lain - Menilai dan mengukur kinerja; penilaian pegawai; penilaian pencatatan, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan - Mengarahkan, memimpin dan mengemabangkan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku - Mempromosikan, mutasi, rekrutmen pegawai dalam pengembangan pegawai 	<p>Sangat Setuju</p> <p>Setuju</p> <p>Netral</p> <p>Tidak Setuju</p> <p>Sangat Tidak Setuju</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>

3.5 Uji Instrumen Penelitian

Sebelum instrument digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka dilakukan terlebih dahulu uji coba untuk mendapatkan instrument yang masih sah (*valid*) dan handal (*reliabel*) secara empiris.

3.5.1 Uji Validitas

Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu tes melakukan fungsi ukurannya. Suatu alat ukur yang valid tidak sekedar mengungkapkan data dengan tepat, akan tetapi juga harus memberikan gambaran mengenai data tersebut. Suatu tes atau instrument pengukur dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi atau memberikan hasil ukurannya yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran.

Menurut Kaiser dan Rice (1974) untuk menunjukkan validitas kontrak dari masing-masing variabel maka nilai dari Kaiser Mayer-Olkin *Measure of Sampling Adequacy* (kaiser MSA) yang diisyaratkan agar data yang dikumpulkan tepat, maka nilai analisis faktor harus diatas 0,5, sedangkan item yang dimasukkan dalam analisis akhir adalah item yang memiliki faktor *loading* lebih dari 0,4.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak beda dilakukan pengulangan pengukuran terhadap subyek yang sama. Uji ini hanya dapat dilakukan pada pertanyaan-pertanyaan yang valid saja. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus alpha atau Crobach's

Alpha. Instrumen dikatakan reliable apabila memiliki Crobach's Alpha lebih besar dari 0.5 (Nummaly, 1967).

3.6 *Methods Successive Interval (MSI)*

Methods Successive Interval (statistik yang bergantung pada distribusi tertentu dan yang menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi seperti pengujian hipotesis dan penaksiran parameter), memerlukan terpenuhinya persyaratan bahwa skala pengukuran minimal **Interval**, sedangkan bila dari data penelitian diperoleh data yang memberikan skala pengukuran Ordinal (kebanyakan dalam kasus-kasus penelitian sosial), sehingga agar analisis tersebut dapat dilanjutkan maka skala pengukuran **Ordinal** harus dinaikkan (ditransformasikan) ke dalam skala **Interval** dengan menggunakan *Methods Successive Interval (MSI)*. Menurut Syarifudin Hidayat (2005:55) pengertian *Method of Successive Interval* adalah: "Metode penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval". Langkah-langkah transformasi data ordinal ke data interval yaitu: *Successive Interval* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perhatikan nilai jawaban dari setiap pertanyaan dalam kuesioner
2. Untuk setiap pertanyaan tersebut, dilakukan perhitungan ada berapa responden yang menjawab skor 1, 2, 3, 4, 5 = frekuensi (f)
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya n responden dan hasilnya = proporsi (p)
4. Kemudian hitung proporsi kumulatifnya (pk)

5. Dengan menggunakan tabel normal, dihitung nilai distribusi normal (Z) untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.

$$f(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Z^2}{2}}, -\infty < Z < +\infty$$

6. Tentukan nilai densitas normal (f_d) yang sesuai dengan nilai Z
7. Tentukan nilai interval (scale value) untuk setiap skor jawaban.
8. Sesuaikan nilai skala ordinal ke interval, yaitu Skala Value (SV) yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama dengan jawaban responden yang terkecil melalui transformasi berikut ini:

$$\text{Transformed Scale Value} : SV = - \{ \text{Min data} - \text{Min SV} \}$$

Proses pentransformasian data ordinal menjadi data interval dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer yaitu Microsoft Office Excel 2007 (*Analyze*).

3.7 Teknik Analisa Data Hasil Penelitian

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis ini bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Dengan cara menyajikan data kedalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai pemusatan (dalam hal nilai rata-rata, median, modus): dan nilai disperse (standar deviasi dan koefisien variasi) serta menginterpretasikannya. Analisis ini tidak menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya dan tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk

mendapatkan rata-rata skor masing-masing indikator dalam pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuisioner dipakai rumus berikut:

$$\text{Rata - rata skor} = \frac{(5.SL) + (4.SR) + (3KK) + 2.JR) + 1.TP)}{SL + SR + KK + JR + TP}$$

Di mana :

- S = Selalu
 SR = Sering
 KK = Kadang-Kadang
 JR = Jarang
 TP = Tidak Pernah

Sedangkan untuk mencari tingkat pencapaian jawaban responden digunakan rumus berikut:

$$TCR = \frac{\text{Rata - rata Skor}}{5} \times 100$$

Dimana : TCR = tingkat pencapaian jawaban responden

Arikunto (2002) mengemukakan kriteria jawaban responden sebagai berikut:

- a) Jika TCR berkisar antara 76 – 100 % = baik
- b) Jika TCR berkisar antara 56 – 75,99 % = cukup
- c) Jika TCR berkisar antara 0 – 55,99 % = kurang

1.7.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah garis regresi yang didapat bermakna sebagai prediktor maka perlu dilakukan pengujian asumsi dasar.

1. Normalitas

Untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variable dependent dan variable independent keduanya mempunyai distributor normal atau tidak, dapat dilakukan dengan uji normalitas. Model regresi yang baik adalah mamiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk melihat normalitas data, peneliti melakukan uji normalitas dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data mamiliki nilai $p > 0,05$.

2. Multikolinieritas

Multikolieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Bila variabel-variabel bebas berkolerasi secara sempurna, maka metode kuadrat terkecil tidak dapat digunakan. Adanya multikolinieritas mengakibatkan penaksir-penaksir kuadrat terkecil menjadi tidak efisien. Oleh karena itu masalah multikolinieritas harus dianggap sebagai satu kelemahan (*black mark*) yang mengurangi keyakinan dalam uji signifikan konvensional terhadap penaksir-penaksir kuadrat terkecil. Menurut Gujaratti (1999) tanda yang paling jelas dari multikolinieritas adalah R^2 yang sangat tinggi tetapi tidak satupun koefisien regresi signifikan secara statistik atas dasar uji. Penanggulangan gejala multikolinieritas ini dilakukan dengan cara mengeluarkan salah satu variabel yang memiliki R^2 paling rendah dari model.

3. Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi penting dari model linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) U_i yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah homokedastis, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Akan tetapi ada kasus dimana seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang satu atau varian-nya tidak konstan. Kondisi varian nir konstan atau nir homogen ini disebut heteroskedastisitas. Akibat heteroskedastisitas sama dengan akibat autokorelasi yaitu varian dari taksiran kuadrat terkecil akan salah dan peramalan tidak menjadi efisien. Salah satu cara untuk mengetahui adanya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan pengujian dengan uji korelasi *rank Spearman*. Formulasi *rank Spearman* adalah sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana:

d_i = Perbedaan rank yang diberikan kepada kedua karakteristik yang berbeda dari individu ke 1

n = Banyaknya individu atau sampel

Selanjutnya pengujian heterosdestisitas dengan menggunakan pengujian **t** adalah sebagai berikut :

$$t = r_s \sqrt{\frac{N - 2}{1 - r_s^2}}$$

Dalam penelitian ini digunakan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan $df = N-2$, jika nilai t hitung lebih kecil dari t table maka kesimpulan statistiknya adalah menerima H_0 artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Estimasi dari koefisien multiple regresi, pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan program bantu EViews4.

3.7.3 Analisa Regresi Linier Berganda

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yang dikembangkan digunakan analisis regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_i$$

Keterangan :

- β_0 = Konstan
- β_1 = Koefisien Regresi
- Y = Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- X_1 = Akutansi Keuangan
- X_2 = Manajemen Keuangan
- X_3 = Partisipasi Anggaran
- ε = Eror Term

3.7.3.1 Uji Hipotesis

1. Uji f

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat F menurut Rangkuti (1997:165) digunakan rumus:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Dimana :

F = F hitung selanjutnya dibandingkan dengan F tabel

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel

n = Banyaknya sampel

Pengujian dengan uji F variansya adalah dengan membandingkan F_{hitung} (F_h) dengan F_{tabel} (F_t) pada $\alpha = 0,05$ apabila hasil perhitungannya menunjukkan :

1. $F_h \geq F_t$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Artinya pengaruh variabel Pemahaman Sistem Akutansi Keuangan (X_1), Manajemen Keuangan (X_2) dan Partisipasi Anggaran (X_3) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah signifikan.

2. $F_h < F_t$ maka H_0 diterima H_a ditolak

Artinya pengaruh variabel Pemahaman Sistem Akutansi Keuangan (X_1), Manajemen Keuangan (X_2) dan Partisipasi Anggaran (X_3) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak signifikan.

2. Uji t

Untuk menguji koefisien regresi secara parsial guna mengetahui apakah variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat digunakan uji t (Rangkuti,1997:166).

$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

Dimana :

β_i = parameter estimasi dari X

$S\beta_i$ = standar error X

Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan t hitung (t_h) dengan t tabel (t_t) pada α 0,05. Apabila hasil perhitungan menunjukkan:

- i) $t_h \geq t_t$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Artinya variasi variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebas (variabel terikat) dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang diuji.

- ii) $t_h < t_t$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Artinya variasi variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel tidak bebas (variabel terikat) dan tidak terdapat pengaruh antara dua variabel yang diuji.

3.7.3.2. Rancangan Uji Hipotesis

Hipotesa merupakan dugaan atas jawaban sementara dari suatu masalah yang masih dibutuhkan atau diuji secara empiris, dengan tujuan untuk mengetahui apakah pernyataan atau jawaban yang diberikan dapat diterima atau tidak. Pada penelitian ini masalah yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi (X_1), Manajemen Keuangan (X_2) dan Partisipasi Anggaran (X_3) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y) dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan karakter dari variabel yang akan diujikan berdasarkan perumusan Hipotesa, sebagai berikut:

1. Pemahaman Sistem Akuntansi diduga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H_0 : Pemahaman Sistem Akuntansi diduga tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

H_1 : Pemahaman Sistem Akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Manajemen Keuangan diduga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H_0 : Manajemen Keuangan diduga tidak berpengaruh Secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H_1 : Manajemen Keuangan diduga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Partisipasi Anggaran diduga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H_0 : Partisipasi Anggaran diduga tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H_1 : Partisipasi Anggaran diduga berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Pemahaman Sistem Akuntansi, Manajemen Keuangan, dan Partisipasi Anggaran secara bersama-sama diduga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H_0 : Pemahaman Sistem Akuntansi, Manajemen Keuangan, dan Partisipasi Anggaran diduga tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

H_1 : Pemahaman Sistem Akuntansi, Manajemen Keuangan, dan Partisipasi Anggaran diduga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Kabupaten Bungo adalah sebuah kabupaten yang terletak dibagian barat Provinsi Jambi. Muara Bungo adalah ibukota dari kabupaten ini. Dahulu, saat Kesultanan Jambi masih berkuasa, daerah Muara Bungo juga merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Jambi. Saat itu wilayah Muara Bungo terdiri dari beberapa negeri yang disebut Bathin. Seperti Bathin Batang Bungo, Bathin Jujuhan, Bathin Batang Tebo dan Bathin Batang Pelepat. Pada awalnya pemimpin Muara Bungo adalah Sultan Mangkubumi yang berkedudukan di Balai Panjang atau di wilayah Dusun Tanah Periuk saat ini. Sultan Mangkubumi dan juga pemimpin-pemimpin setelahnya dalah Wakil Rajo Jambi di Muara Bungo yang sudah ditetapkan oleh Rajo atau Sultan Jambi waktu itu untuk memimpin Muara Bungo.

Tahun 1904 Sultan Thaha Syaifudin selaku Sultan Jambi wafat dalam pertempuran di Betung Bedarah saat perang menghadapi Belanda, sehingga mengakibatkan Kesultanan Jambi takluk dibawah pemerintah kolonial Belanda. Pada 1906 semua wilayah Kesultanan Jambi termasuk Muara Bungo berada dibawah pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1926, wilayah Muara Bungo dibagi ke dalam wilayah-wilayah yang disebut dengan Marga. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tanah Sepenggal
2. Jujuhan

3. Bilangan V dan VII
4. Bathin VII
5. Bathin III Ilir
6. Bathin III Ulu
7. Bathin II
8. Pelepat

Sistem pemerintahan Marga ini sebetulnya mirip dengan pemerintahan Bathin sebelumnya. Yaitu Marga/Bathin membawahi beberapa dusun. Pemerintahan Marga ini dipimpin oleh seorang yang disebut 'Pasirah'. Sedangkan Dusun dipimpin oleh seorang yang disebut 'Rio'. Dusun terbagi lagi atas beberapa Kampung.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bungo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin. Dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi. Berdasarkan UU No.10/1948, Karesidenan Jambi termasuk ke dalam propinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya berdasarkan UU No.12/1956, ibukota Kabupaten Merangin yang semula berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Berdasarkan UU No.81/1958, Propinsi Jambi dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Merangin, Kerinci, dan Batanghari.

Pemekaran ini mendorong DPRD Peralihan dan DPR-GR Kabupaten Merangin mendesak Pemerintah Pusat untuk memekarkan Kabupaten Merangin menjadi dua kabupaten. Diusulkan Kewedanaan Muara Bungo dan Kewedanaan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo, dengan Muara Bungo sebagai ibukotanya. Sedangkan kewedanaan Sarolangun dan Kewedanaan Bangko menjadi Kabupaten Bangko dengan kedudukan ibukota di Bangko.

Setelah mengirimkan delegasi ke Jakarta hingga beberapa kali, maka pada 12 September 1965 dilaksanakan pelantikan M. Saidi sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo. Pada 19 Oktober 1965 DPR-GR Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo mengubah nama Kabupaten Muara Bungo Tebo menjadi Kabupaten Bungo Tebo dengan julukan "Bumi Sepucuk Bulat Seurat Tunggang" serta menjadikan 19 Oktober 1965 sebagai hari jadi kabupaten. Perubahan terus berlanjut, reformasi bergema dimana-mana. Pada 1999, Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Peresmian dilaksanakan di Jakarta pada 12 Oktober 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Sejak saat itulah berdiri Kabupaten Bungo dengan ibukota di Muara Bungo dan mendapat julukan "*Langkah Serentak Limbai Seayun.*"

Kabupaten Bungo terletak di bagian barat Provinsi Jambi dengan luas wilayah sekitar 7.160 km². Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi 101° 27' sampai dengan 102° 30' Bujur Timur dan di antara 1° 08' hingga 1° 55' Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Darmasraya (Sumbar) di sebelah utara, Kabupaten Tebo di sebelah timur, Kabupaten Merangin di sebelah selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah barat. Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana sekitar 87,70 persen di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki

kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28 persen). Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8° - 26,7° C. Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 berada di atas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata-rata 15 hari per bulan.

Visi Kabupaten Bungo :

"Bungo yang Mandiri, Aman dan Sejahtera Tahun 2016"
atau disingkat menjadi "Bungo MAS 2016"

Misi Kabupaten Bungo

Untuk mencapai visi tersebut dilakukan melalui Misi:

1. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa ke hadirat Allah SWT, serta meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan udara yang mendorong sekaligus mendukung kemajuan perekonomian daerah;
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah, efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima;
4. Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-

simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri kecil, perdagangan dan jasa, serta koperasi;

5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara cerdas dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan hidup;
6. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
7. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui partisipasi aktif masyarakat;
8. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan beragama, adat istiadat dan budaya guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat.

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, pelayanan administrasi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan daerah;
- d. Pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah dan Bupati/Wakil Bupati.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dan Program Kerja Tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bungo serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten dan 9 (sembilan) orang Kepala Bagian, serta 27 (dua puluh tujuh) Subbagian yang berpedoman pada Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo tanggal 18 November 2010 sebagai berikut :

- A. Sekretaris Daerah;
- B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama;
 - b. Sub Bagian Tata Pemerintah;
 - c. Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah.
 - 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan;

- b. Sub Bagian Agama dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Sub Bagian Kemasyarakatan.

3. Bagian Humas, membawahi :

- a. Sub Bagian PDE dan Publikasi;
- b. Sub Bagian Keprotokolan;
- c. Sub Bagian Santelda.

C. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II), membawahi :

1. Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan, membawahi :

- a. Sub Bagian Administrasi Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan;
- c. Sub Bagian Administrasi Keuangan.

2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahi :

- a. Sub Bagian Administrasi Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Sub Bagian Administrasi Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Bagian Administrasi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.

3. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :

- a. Sub Bagian Koperasi dan UMKM;
- b. Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah;
- c. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan.

D. Asisten Bagian Umum, membawahi :

1. Bagian Umum, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga.
2. Bagian Hukum, membawahi :
- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c. Sub Bagian Dokumen Hukum.
3. Bagian Organisasi, membawahi :
- a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- E. Staf Ahli Bupati, terdiri dari :
- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
 - e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

4.1.1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Responden tersebut dikategorikan dalam beberapa karakteristik responden untuk memberikan gambaran yang jelas, yaitu berdasarkan usia, masa kerja, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan, penghasilan. Jumlah kuesioner yang dikumpulkan sebanyak 53 kuesioner. Total responden dalam penelitian ini berjumlah

53 orang dengan tingkat *respons rate* sebesar 100%. Objek penelitian adalah semua pegawai baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga honorer yang bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden dapat diungkapkan karakteristiknya yang meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jabatan dan penghasilan. Secara rinci dapat diungkapkan berikut ini.

a. Usia Responden

Usia responden sangat terkait dengan pengalaman kerja dan pemahaman seorang pegawai atau karyawan dalam pekerjaannya. Usia yang semakin tua semakin membuat seseorang semakin berpengalaman dan semakin matang dan bertanggungjawab dalam bekerja serta semakin paham seluk beluk pekerjaannya termasuk tuntutan dan aturan main dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal yang sama diharapkan akan terjadi pula pada pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Pada Tabel 4.1 tergambar umur responden dalam penelitian ini.

Tabel 4.1
Pengelompokkan Responden Berdasarkan Usia

No	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
1	≤ 30	2	4
2	31 – 40	20	38
3	41 – 50	16	30
4	≥ 51	15	28
Jumlah		53	100

Sumber : Data Olahan Kepegawaian 2014

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kebanyakan pegawai responden dengan usia kurang dari 30 tahun sebanyak 2 orang (4%) selanjutnya Pegawai pada kisaran usia 31 - 40 tahun yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar (38 %) dari keseluruhan responden. Selanjutnya, pegawai dengan usia pada kisaran 41 - 50 tahun sebanyak 16 orang responden atau (30 %) dari keseluruhan responden dan Responden dengan tingkat usia di atas 51 tahun sebanyak 15 orang (28 %).

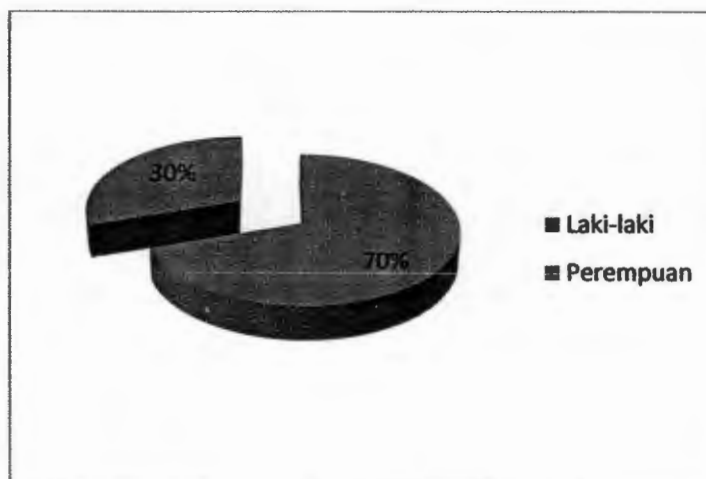
b. Jenis Kelamin

Faktor gender memang berhubungan dengan aspek-aspek tertentu dari sosiometrik. Pegawai perempuan lebih menonjol dalam aspek simpatik dan penerimaannya terhadap orang lain, sementara pegawai laki-laki lebih menonjol dalam aspek sosiabilitas. Oleh karena itu, perbedaan gender ini akan mempengaruhi kebiasaan seseorang sehingga akan menghasilkan sifat, budaya dalam kegiatannya berorganisasi. Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat penulis sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	37	70
Perempuan	16	30
Total	53	100

Sumber: Data olahan Kepegawaian 2014



Gambar 4.1
Komposisi Responden Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Gambar 4.1 di atas menunjukkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden berdasarkan jenis kelamin terbanyak yaitu pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 37 orang atau (54%) dari seluruh responden. Sementara itu, responden perempuan sebanyak 16 orang atau (46 %) dari keseluruhan responden.

Dari sebaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam memutuskan suatu kebijakan akan lebih bersifat rasional dan disesuaikan dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

c. Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kemampuan kerja seorang pegawai. Karena pendidikan merupakan faktor yang bisa dijadikan alat untuk menilai dan melihat kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut Hasibuan (2006) bahwa “pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan

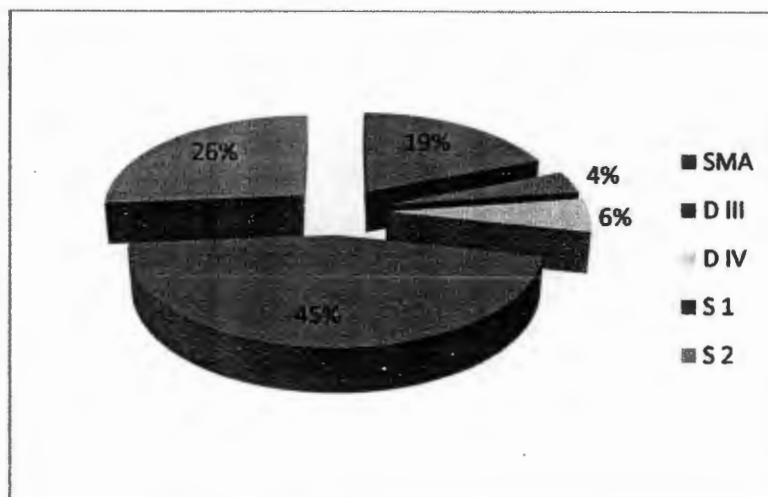
seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan pula seseorang dianggap mampu menduduki suatu jabatan. Berikut gambaran pendidikan terakhir para pegawai. Dalam penelitian ini, berdasarkan pendidikan terakhir responden dibagi menjadi 5 kelompok yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma III, Diploma IV, Strata 1 dan Strata 2. Data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir ditunjukkan pada Tabel 4.3 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	10	19
Diploma III	2	4
Diploma IV	3	6
Strata 1	24	45
Strata 2	14	26
Total	53	100

Sumber : Data Primer Kepegawaian, 2014

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diinformasikan bahwa responden berdasarkan pendidikan yaitu untuk responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 10 (sepuluh) pegawai atau 19%, untuk responden berpendidikan terakhir Diploma III sebanyak 2 (dua) pegawai atau 4%, untuk responden berpendidikan terakhir Diploma IV sebanyak 3 (tiga) pegawai atau 6%, untuk responden berpendidikan Strata 1 sebanyak 24 (dua puluh empat) pegawai atau 45% dan untuk responden berpendidikan terakhir Strata 2 sebanyak 14 (empat belas) pegawai atau 26% .



Gambar 4.2.
Komposisi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Gambar 4.2 menunjukkan karakteristik responden dengan tingkat pendidikan, memperlihatkan bahwa hampir 50% pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo berpendidikan terakhir S1. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengisi Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo sebagian besar pegawai diutamakan pegawai yang memiliki pendidikan tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki pegawai pada umumnya semakin tinggi pula kualitas kerja yang dimilikinya.

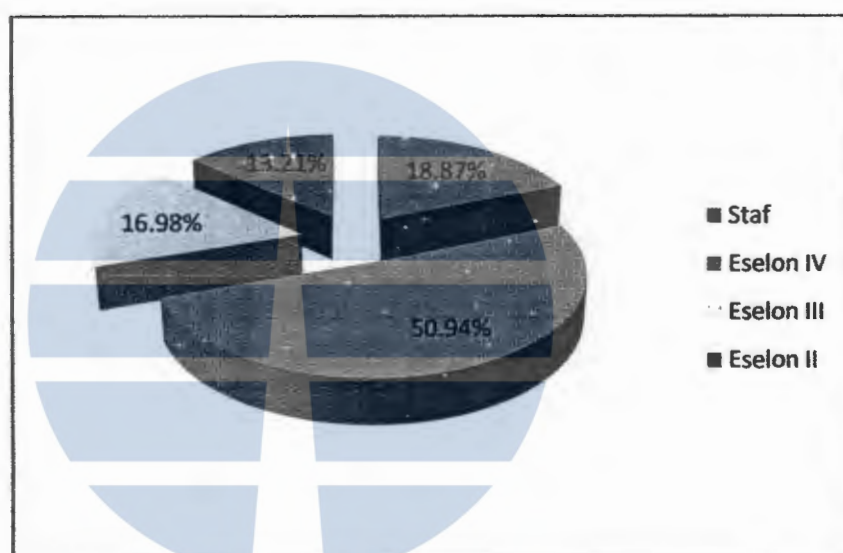
d. Responden Berdasarkan Jabatan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat penulis sajikan data jabatan pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini pada Tabel 4.4 dan diperjelas pada Gambar 4.3.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
Staf	10	18.87
Eselon IV	27	50.94
Eselon III	9	16.98
Eselon II	7	13.21
Total	53	100

Sumber : Data Primer Kepegawain, 2014



Gambar 4.3.
Komposisi Responden Menurut Jabatan

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Gambar 4.3 dapat diinformasikan bahwa responden berdasarkan jabatan yaitu responden dengan jabatan staf sebanyak 10 (sepuluh) pegawai atau 18.97%, Eselon IV sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pegawai atau 50.94%, Eselon III sebanyak 9 (sembilan) pegawai atau 16.98%, dan Eselon II sebanyak 7 (tujuh) pegawai atau 13.21%.

Sesuai dengan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Jabatan memegang peranan penting dalam suatu organisasi, karena dengan adanya jabatan maka akan mempermudah pendelegasian tugas, sehingga tugas tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan yang diemban.

e. Responden Berdasarkan Masa Kerja

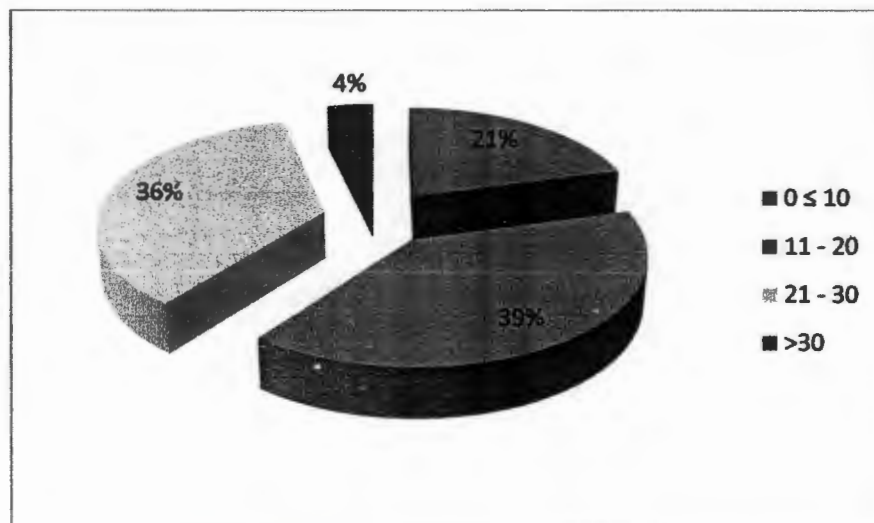
Masa kerja pegawai harus menjadi perhatian serius bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena dengan masa kerja yang lama akan memperlihatkan kemampuan pegawai dalam menguasai bidang tugas yang diembannya. Serta dengan adanya penerapan masa kerja dalam suatu organisasi akan membantu bagian kepegawaian dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan dalam mempromosikan pegawai yang dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
≤ 10	11	21
11 – 20	21	40
21 – 30	19	36
> 30	2	4
Total	53	100

Sumber : Data Primer Kepegawaian, 2014



Gambar 4.4
Komposisi Responden Menurut Masa Kerja

Tabel 4.5 dan Gambar 4.4 mendeskripsikan Responden menurut Masa Kerja pada halaman sebelum ini dapat diuraikan bahwa responden berdasarkan masa kerja ≤ 10 tahun adalah sebanyak 11 (sebelas) pegawai atau 21%, masa kerja 11 - 20 tahun adalah sebanyak 21 atau 40%, masa kerja 21 - 30 adalah sebanyak 19 atau 36% dan masa kerja lebih dari 30 tahun adalah sebanyak 2 atau 4%.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa kerja memberikan gambaran secara menyeluruh, karena dengan masa kerja yang lama bagi seorang pegawai berarti pegawai tersebut telah memiliki pengalaman kerja yang lama dan memahami secara mendetail dari tugas dan fungsi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga memberikan kemudahan bagi pegawai tersebut dalam menyelesaikan pekerjaan yang didelegasikan.

f. Responden Berdasarkan Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis sajikan informasi mengenai Penghasilan, sesuai dengan Tabel 4.6 berikut ini:

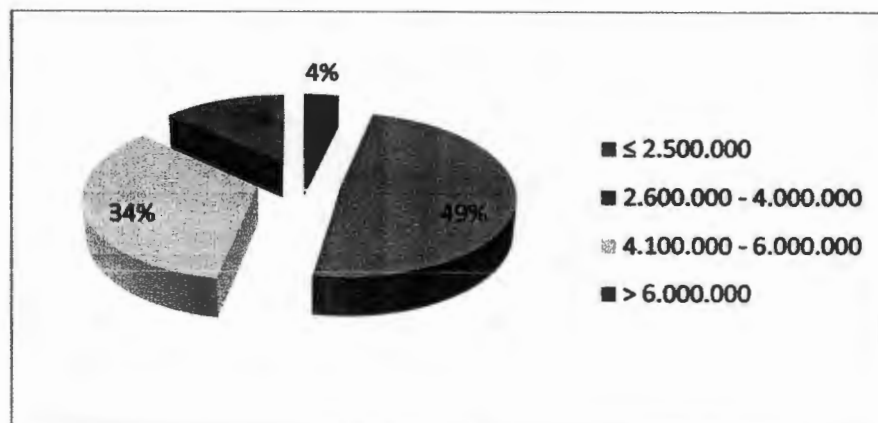
Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan	Jumlah	Persentase
$\leq 2,5$ juta	2	4
2,6 juta - 4 juta	26	49
4,1 juta - 6 juta	18	34
> 6 juta	7	13
Total	53	100

Sumber : Data Primer Kepegawaian, 2014

Dalam penelitian ini, responden berdasarkan penghasilan dapat dijelaskan secara terperinci yaitu responden dengan penghasilan $\leq 2,5$ juta adalah sebanyak 2 pegawai, responden dengan penghasilan 2,6 - 4 juta adalah sebanyak 26 pegawai, responden dengan penghasilan 4,1 - 6 juta adalah sebanyak 18 pegawai, dan responden dengan penghasilan > 6 juta adalah sebanyak 7 pegawai.

Bila dilihat berdasarkan penyajian prosentasenya dapat dilihat secara terperinci pada Gambar 4.5. berikut ini:



Gambar 4.5
Komposisi Responden Menurut Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa komposisi responden yang berpenghasilan $\leq 2,5$ juta adalah sebanyak 4%, untuk komposisi responden dengan penghasilan 2,6 - 4 juta adalah sebanyak 49%, dan komposisi responden berpenghasilan 4,1 - 6 juta sebanyak 34%, serta dengan komposisi responden berpenghasilan > 6 juta adalah sebanyak 13%.

Hal ini menggambarkan bahwa berdasarkan penghasilan yang diterima pegawai dalam penelitian ini adalah responden memiliki keberagaman, yang disebabkan oleh masa kerja, jabatan, dan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan meskipun masa kerja masih tergolong baru, maka penghasilannya hampir sama, disisi lainpun demikian semakin tinggi jabatan yang diemban dengan didukung masa kerja dan pendidikan, maka penghasilan juga akan semakin tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Hasil Uji Validitas antar Variabel

Uji validitas diperlukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan mengkorelasi setiap skor variable jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05 dan 0,01.

1. Validitas Variabel Y (Kinerja SKPD)

		Correlations					
		Y-1	Y-2	Y-3	Y-4	Y-5	Total
Y-1	Pearson Correlation	1	.644**	.333*	.538**	.272*	.775**
	Sig. (2-tailed)		.000	.015	.000	.049	.000
	N	53	53	53	53	53	53
Y-2	Pearson Correlation	.644**	1	.411**	.545**	.312*	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.000	.023	.000
	N	53	53	53	53	53	53
Y-3	Pearson Correlation	.333*	.411**	1	.074	.649**	.691**
	Sig. (2-tailed)	.015	.002		.597	.000	.000
	N	53	53	53	53	53	53
Y-4	Pearson Correlation	.538**	.545**	.074	1	.137	.641**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.597		.327	.000
	N	53	53	53	53	53	53
Y-5	Pearson Correlation	.272*	.312*	.649**	.137	1	.662**
	Sig. (2-tailed)	.049	.023	.000	.327		.000
	N	53	53	53	53	53	53
Total	Pearson Correlation	.775**	.813**	.691**	.641**	.662**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Y-1	Y-2	Y-3	Y-4	Y-5	Total
Y-1	Pearson Correlation	1	.644**	.333*	.538**	.272*	.775**
	Sig. (2-tailed)		.000	.015	.000	.049	.000
	N	53	53	53	53	53	53
Y-2	Pearson Correlation	.644**	1	.411**	.545**	.312*	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.000	.023	.000
	N	53	53	53	53	53	53
Y-3	Pearson Correlation	.333*	.411**	1	.074	.649**	.691**
	Sig. (2-tailed)	.015	.002		.597	.000	.000
	N	53	53	53	53	53	53
Y-4	Pearson Correlation	.538**	.545**	.074	1	.137	.641**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.597		.327	.000
	N	53	53	53	53	53	53
Y-5	Pearson Correlation	.272*	.312*	.649**	.137	1	.662**
	Sig. (2-tailed)	.049	.023	.000	.327		.000
	N	53	53	53	53	53	53
Total	Pearson Correlation	.775**	.813**	.691**	.641**	.662**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan uji Validitas terhadap variabel Y (sebagai variabel dependen) dapat diinformasikan bahwa sesuai dengan hasil olah data tersebut setiap item soal memiliki hubungan antar item soal dengan nilai lebih besar dari nol, berarti item soal tersebut valid.

Y1 = Menentukan tujuan, kebijakan dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalan kerja, penganggaran, merencanakan prosedur dan pemrograman

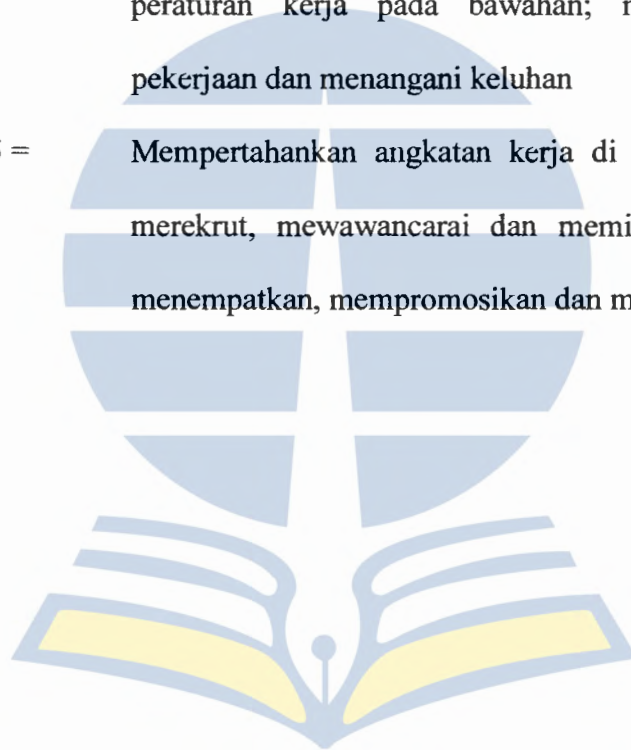
Y2 = Tukar menukar informasi dengan orang lain di bagian

organisasi lain untuk mengaitkan dan menyesuaikan program; memberitahu SKPD lain

Y3 = Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan: penilaian pegawai, penilaian catatan, penilaian catatan hasil, penilaian laporan keuangan

Y4 = Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan Bapak/Ibu: membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan; memberikan tugas pekerjaan dan menangani keluhan

Y5 = Mempertahankan angkatan kerja di bagian Bapak/Ibu: merekrut, mewawancarai dan memilih pegawai baru; menempatkan, mempromosikan dan memutasi pegawai



2. Validitas Variabel X₁ (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Correlations

		X ₁ -1	X ₁ -2	X ₁ -3	X ₁ -4	X ₁ -5	X ₁ -6	Total
X ₁ -1	Pearson Correlation	1	.512**	.195	.431**	.419**	.341*	.699**
	Sig. (2-tailed)		.000	.163	.001	.002	.013	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -2	Pearson Correlation	.512**	1	.094	.282*	.026	-.007	.450**
	Sig. (2-tailed)	.000		.503	.041	.854	.963	.001
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -3	Pearson Correlation	.195	.094	1	.354**	.539**	.440**	.636**
	Sig. (2-tailed)	.163	.503		.009	.000	.001	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -4	Pearson Correlation	.431**	.282*	.354**	1	.512**	.518**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.001	.041	.009		.000	.000	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -5	Pearson Correlation	.419**	.026	.539**	.512**	1	.799**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.002	.854	.000	.000		.000	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -6	Pearson Correlation	.341*	-.007	.440**	.518**	.799**	1	.761**
	Sig. (2-tailed)	.013	.963	.001	.000	.000		.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Total	Pearson Correlation	.699**	.450**	.636**	.756**	.810**	.761**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	53	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan uji Validitas terhadap variabel X₁ (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan) dapat diinformasikan bahwa sesuai dengan hasil olah data tersebut setiap item soal memiliki hubungan antar item soal dengan nilai lebih besar dari nol, berarti item soal tersebut valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item soal yang telah

ditetapkan dalam penelitian layak untuk disebarkan kepada responden, seperti yang tertera dibawah ini:

- X₁-1 Memahami sistem dan prosedur kuntansi penerimaan kas
- X₁-2 Memahami sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas
- X₁-3 Memahami sistem dan prosedur akuntansi aset tetap
- X₁-4 Memahami sistem akuntansi selain kas
- X₁-5 Memahami sistem pencatatan *double entry*
- X₁-6 Memahami prosedur yang harus dilakukan untuk menjembatani kas basis ke akrual basis

Dari setiap item soal di atas menjelaskan bahwa pegawai harus memahami sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga laporan keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah dapat diselesaikan tepat waktu dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.



3. Validitas Variabel X₂ (Managemen Keuangan Daerah)

Correlations

	X ₂ -1	X ₂ -2	X ₂ -3	X ₂ -4	X ₂ -5	X ₂ -6	X ₂ -7	Total
X ₂ -1 Pearson Correlation	1	.427**	.296*	.283*	.028	.394**	.589**	.621**
Sig. (2-tailed)		.001	.031	.040	.842	.003	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -2 Pearson Correlation	.427**	1	.508**	.473**	.213	.415**	.595**	.743**
Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.125	.002	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -3 Pearson Correlation	.296*	.508**	1	.317*	.193	.534**	.539**	.697**
Sig. (2-tailed)	.031	.000		.021	.166	.000	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -4 Pearson Correlation	.283*	.473**	.317*	1	.520**	.467**	.471**	.734**
Sig. (2-tailed)	.040	.000	.021		.000	.000	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -5 Pearson Correlation	.028	.213	.193	.520**	1	.175	.287*	.505**
Sig. (2-tailed)	.842	.125	.166	.000		.210	.037	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -6 Pearson Correlation	.394**	.415**	.534**	.467**	.175	1	.528**	.726**
Sig. (2-tailed)	.003	.002	.000	.000	.210		.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -7 Pearson Correlation	.589**	.595**	.539**	.471**	.287*	.528**	1	.823**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.037	.000		.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
Total Pearson Correlation	.621**	.743**	.697**	.734**	.505**	.726**	.823**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	53	53	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan uji Validitas terhadap variabel X₁ (Manajemen Keuangan Daerah) dapat diinformasikan bahwa sesuai dengan hasil olah data tersebut setiap item soal memiliki hubungan antar item soal

dengan nilai lebih besar dari nol, berarti item soal tersebut valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item soal yang telah ditetapkan dalam penelitian layak untuk disebarakan kepada responden.

- X₂-1 = RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja
- X₂-2 = Penyusunan RKA SKPD berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal
- X₂-3 = Pelaksanaan DPA SKPD sesuai indikator kinerja dan capaian atau target kinerja
- X₂-4 = Penatausahaan pendapatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Begeri Nomor 13 Tahun 2006
- X₂-5 = Penatausahaan belanja telah sesuai dengan penggunaan dokumen SPP, SPM, SP2D untuk UP/GU/TU/LS
- X₂-6 = SKPD harus membuat Laporan Semester I, serta laporan keuangan SKPD merupakan laproan pertanggungjawaban pengguna anggaran
- X₂-7 = Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan SKPD

4. VALIDITAS VARIABEL X₃ (Partisipasi Penyusunan Anggaran)

Correlations

	X ₃ -1	X ₃ -2	X ₃ -3	X ₃ -4	X ₃ -5	X ₃ -6	total
X ₃ -1 Pearson Correlation	1	.059	.293*	.543**	.317*	.076	.576**
Sig. (2-tailed)		.675	.033	.000	.021	.587	.000
N	53	53	53	53	53	53	53
X ₃ -2 Pearson Correlation	.059	1	.502**	.286*	.197	.219	.551**
Sig. (2-tailed)	.675		.000	.038	.157	.114	.000
N	53	53	53	53	53	53	53
X ₃ -3 Pearson Correlation	.293*	.502**	1	.464**	.359**	.575**	.799**
Sig. (2-tailed)	.033	.000		.000	.008	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53
X ₃ -4 Pearson Correlation	.543**	.286*	.464**	1	.594**	.223	.782**
Sig. (2-tailed)	.000	.038	.000		.000	.108	.000
N	53	53	53	53	53	53	53
X ₃ -5 Pearson Correlation	.317*	.197	.359**	.594**	1	.268	.689**
Sig. (2-tailed)	.021	.157	.008	.000		.052	.000
N	53	53	53	53	53	53	53
X ₃ -6 Pearson Correlation	.076	.219	.575**	.223	.268	1	.596**
Sig. (2-tailed)	.587	.114	.000	.108	.052		.000
N	53	53	53	53	53	53	53
total Pearson Correlation	.576**	.551**	.799**	.782**	.689**	.596**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	53	53	53	53	53	53	53

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan uji Validitas terhadap variabel X₃ (Partisipasi Penyusunan Anggaran) dapat diinformasikan bahwa sesuai dengan hasil olah data tersebut setiap item soal memiliki hubungan antar item soal dengan nilai lebih besar dari nol, berarti item soal tersebut valid. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item soal yang telah ditetapkan

dalam penelitian layak untuk disebarakan kepada responden, seperti yang tertera dibawah ini:

- X3-1 = Seberapa jauh keterlibatan Saudara dalam penyusunan anggaran di bidang tanggung jawab Saudara?
- X3-2 = Seberapa logis/masuk akal nya alasan yang diberikan oleh atasan Suadara dalam merevisi anggaran Suadar?
- X3-3 = Seberapa sering Suadara memberi pendapat atau opini tentang anggaran kepada atasan Sudara?
- X3-4 = Seberapa jauh pengaruh Suadara terhadap anggaran akhir bidang tanggung jawab Sudara?
- X3-5 = Seberapa penting kontribusi Saudara terhadap proses penyusunan anggaran?
- X3-6 = Seberapa sering Saudara diminta pendapat atau opini ketika anggaran disusun oleh atasan Saudara?

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Sumadi Suryabrata (2004: 28) reliabilitas menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan.

1. Reliabilitas Variabel Y (Kinerja SKPD)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.762	5

Berdasarkan uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's Alpha 0.762 dengan R_{tabel} 0.270 (Cronbach's Alpha 0.762 > R_{tabel} 0.270), ini menunjukkan bahwa variabel Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dinyatakan reliabel, yang dituangkan dalam setiap indikator-indikator yang dijadikan pertanyaan dalam penelitian ini.

2. Reliabilitas Variabel X₁ (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.778	6

Berdasarkan uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's Alpha 0.778 dengan R_{tabel} 0.270 (Cronbach's Alpha 0.778 > R_{tabel} 0.270), ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dinyatakan reliabel.

3. Reliabilitas Variabel X₂ (Managemen Keuangan Daerah)

Scale: ALL VARIABLE

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.817	7

Berdasarkan uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's Alpha 0.817 dengan R_{tabel} 0.270 (Cronbach's Alpha 0.817 > R_{tabel} 0.270), ini menunjukkan bahwa variabel Manajemen Keuangan Daerah dinyatakan reliabel. Karena setiap indikator yang dimunculkan dalam penelitian ini, bila diuji menghasilkan jawaban yang sama. Artinya pengujian dengan menggunakan instrumen yang sama akan menghasilkan jawaban yang sama (konsisten).

4. **Reliabilitas Variabel X₃ (Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran)**

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	6

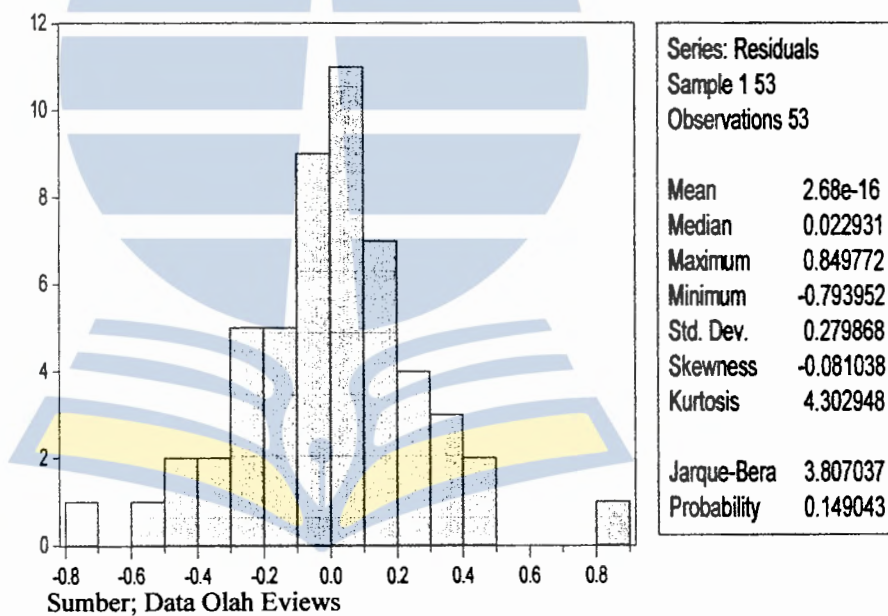
Berdasarkan uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's Alpha 0.751 dengan R_{tabel} 0.270 (Cronbach's Alpha 0.751 > R_{tabel} 0.270), ini menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Anggaran dinyatakan reliabel. Karena setiap indikator yang dimunculkan dalam penelitian ini, bila diuji menghasilkan jawaban yang sama. Artinya pengujian dengan menggunakan instrumen yang sama akan menghasilkan jawaban yang sama (konsisten).

4.2.3. Uji Asumsi Klasik

Tujuan uji asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten atau BLUE yaitu *best, linier, and unbiased estimator*.

1) Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.1 dan penjabarannya dapat disimpulkan bahwa Analisis Hasil Output dengan nilai Probability 0.149 di atas nilai signifikan ($\alpha = 5\%$) bahwa residual berdistribusi normal dengan Jarque-Bera berada pada angka 3.807. Hal ini menjelaskan bahwa kuesioner yang disebarakan dalam sampel menunjukkan berdistribusi normal, yang artinya sample yang digunakan mewakili populasi yang ditetapkan sesuai dengan lingkup penelitian. Hal ini sejalan dengan hasil yang diperoleh dari uji validitas dan reliabilitas.



Gambar 4.1
Grafik Normalitas

2) Uji Multikolenearitas

	Y	X1	X2	X3
		0.7775863	0.85100802	0.798699944
Y	1	713956126	67810679	7419786
	0.777586371		0.732308137	0.634874431
X1	3956126	1	2148922	2726324
	0.851008026	0.7323081		0.770386168
X2	7810679	372148922	1	9441486
	0.798699944	0.6348744	0.770386168	
X3	7419786	312726324	9441486	1

Sumber : Data Olah Eviews

Hasil pengujian multikolenearitas menghasilkan nilai untuk Pemahaman Sistem Anggaran Keuangan (X_1) sebesar 0.777, Manajemen Keuangan (X_2) sebesar 0.851, dan Partisipasi Anggaran (X_3) sebesar 0.798. Dikarenakan semua nilai independen mempunyai nilai *variance inflation factor* (VIF) mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (Pemahaman Sistem Anggaran Keuangan, Manajemen Keuangan, Partisipasi Anggaran) yang dimasukkan dalam model regresi berkorelasi relevan dan layak untuk digunakan.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.658482	Prob. F(9,43)	0.7409
Obs*R-squared	6.419769	Prob. Chi-Square(9)	0.6973
Scaled explained SS	9.062156	Prob. Chi-Square(9)	0.4316

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 10/21/14 Time: 17:21
 Sample: 1 53
 Included observations: 53

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.272653	1.187211	-1.071969	0.2897
X1	-0.064962	0.569441	-0.114080	0.9097
X1^2	0.074317	0.094664	0.785058	0.4367
X1*X2	-0.401064	0.220480	-1.819051	0.0759
X1*X3	0.272292	0.186134	1.462876	0.1508
X2	0.368342	0.796231	0.462607	0.6460
X2^2	0.190898	0.194999	0.978972	0.3331
X2*X3	-0.093950	0.238334	-0.394197	0.6954
X3	0.284664	0.898032	0.316987	0.7528
X3^2	-0.105950	0.130507	-0.811834	0.4214
R-squared	0.121128	Mean dependent var	0.076848	
Adjusted R-squared	-0.062822	S.D. dependent var	0.141000	
S.E. of regression	0.145362	Akaike info criterion	0.850916	
Sum squared resid	0.908591	Schwarz criterion	0.479163	
Log likelihood	32.54929	Hannan-Quinn criter.	0.707958	
F-statistic	0.658482	Durbin-Watson stat	2.252176	
Prob(F-statistic)	0.740909			

Sumber : Hasil Olah Eviews

Berdasarkan hasil olah data melalui Eviews dengan Heteroskedasticity Test: White, dapat diinformasikan bahwa Hasil Analisis Output, berdasarkan tabel output di atas tampak bahwa Obs*R Square untuk estimasi uji white cross term adalah sebesar 6.419769 dan Prob. Chi-Square(9) 0.6973 dengan derajat kepercayaan $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa model ini tidak mengandung heteroskedasitas. Hasil pengujian Heteroskedasticity menunjukkan bahwa Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan (X_1) mempunyai nilai $t = -0.114080$ dengan nilai Probability 0.9097, dan Manajemen Keuangan

(X_2) mempunyai nilai t sebesar 0.462607 dengan nilai probability 0.6460, sedangkan Partisipasi Anggaran (X_3) mempunyai nilai t sebesar 0.316987 dengan nilai probability sebesar 0.7528. Jadi dapat diinformasikan bahwa semua variabel independen secara statistik tidak ada yang signifikan terhadap *absolute residual* atau mempunyai nilai probability lebih besar dari 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi terbatas dari persoalan heteroskedasitas.

Hasil pengujian Heteroskedasticity juga menunjukkan bahwa nilai R-squared 0.121128 dan nilai F-statistic 0.658482 dengan tingkat Prob(F-statistic) 0.740909 dengan F_{tabel} 2.79. Jadi variabel-variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan (X_1), Manajemen Keuangan (X_2), dan Partisipasi Anggaran (X_3) yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai kemampuan menjelaskan Kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah sebesar 74.09 persen, sedangkan sisanya 25.91 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Model regresi yang digunakan sesuai dengan bukti empiris memenuhi kesesuaian hipotesis bahwa F-statistic 0.658482 dengan F_{tabel} 2.79 dengan tingkat Prob(F-statistic) 0.740909, berarti H_1 diterima.

4.2.4. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Manajemen Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah

Berdasarkan hasil olah data dengan alat bantu Eviews

diperoleh hasil sebagai berikut:

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/21/14 Time: 17:15
Sample: 1 53
Included observations: 53

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.978528	0.360987	-2.710703	0.0092
X1	0.306841	0.098684	3.109333	0.0031
X2	0.472658	0.129451	3.651253	0.0006
X3	0.362841	0.118343	3.066010	0.0035
R-squared	0.811732	Mean dependent var		4.182453
Adjusted R-squared	0.800206	S.D. dependent var		0.645007
S.E. of regression	0.288308	Akaike info criterion		0.422895
Sum squared resid	4.072944	Schwarz criterion		0.571596
Log likelihood	-7.206708	Hannan-Quinn criter.		0.480078
F-statistic	70.42252	Durbin-Watson stat		1.962022
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil perhitungan didapatkan persamaan :

$$Y = -0.9785 + 0.3068 X1 + 0.4727 X2 + 0.3628 X3$$

(3.1093)* (3.6513)* (3.0660)* → (angka dalam kurung adalah nilai t hitung)

Adj R-Square = 0.80

Nilai F hitung = 70.422

Prob-(F-statistik) = 0.0000

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dan membandingkan antara nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi 0,05. Dengan asumsi jika nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka dianggap memiliki pengaruh yang signifikan.

Dari hasil pengolahan data diperoleh F_{hitung} sebesar 70.22 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ nilai F_{tabel} (2,546) dan ini juga berarti $p < 0,05$ maka variabel pemahaman system akuntansi keuangan (X_1), Manajemen keuangan (X_2), dan partisipasi anggaran (X_3) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara Simultan. Hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman system akuntansi keuangan (X_1), Manajemen keuangan (X_2), dan partisipasi anggaran (X_3) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara Simultan diterima. Artinya model dapat digunakan dalam menjelaskan variasi tinggi rendahnya kinerja SKPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Besaran pengaruh variabel pemahaman system akuntansi keuangan (X_1), Manajemen keuangan (X_2), dan partisipasi anggaran (X_3) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara Simultan. Hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman

system akuntansi keuangan (X_1), Manajemen keuangan (X_2), dan partisipasi anggaran (X_3) terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo adalah sebesar 0.80. Artinya variasi naik turunnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo ditentukan oleh pemahaman system akuntansi keuangan (X_1), Manajemen keuangan (X_2), dan partisipasi anggaran (X_3) sebesar 0.80, sisanya sebesar 0.20 ditentukan oleh variable lain selain pemahaman system akuntansi keuangan (X_1), Manajemen keuangan (X_2), dan partisipasi anggaran (X_3).

4.2.5. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan informasi keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal Pemerintah Daerah untuk masa yang akan datang. Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik bahwa Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif dengan tingkat signifikan 95% (t_{hitung} 3.109 dengan nilai t_{tabel} 1.675 dengan nilai probability 0.003) terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu H_1 diterima karena Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini berarti Pengujian Hipotesis 1 diterima.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Askam Tuasikal (2006) yang menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Pendapat tersebut didukung pula oleh hasil penelitian Louise (1999:3), menegaskan bahwa sistem akuntansi dapat digunakan untuk mengukur kinerja, karena sistem akuntansi mempertimbangkan reliabilitas dan konsistensi, serta dapat dihubungkan dengan kepentingan utama pemilik dalam meningkatkan profit. Bila dikaitkan dengan organisasi pemerintah daerah pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah termasuk satuan kerja.

4.2.6. Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah

Keuangan Daerah merupakan elemen pokok terhadap aktivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, oleh karena itu penting bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola

(*manage*) Keuangan Daerah dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kerangka Manajemen Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mempunyai fungsi :

1. Fungsi Otorisasi, APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi Perencanaan, APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi Pengawasan, APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi, APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi, APBD harus mengandung arti / memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi Stabilisasi, APBD harus mengandung arti atau harus menjadi alat untuk memelihara dan

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Sesuai dengan hasil perhitungan *Method Least Squares* di halaman sebelumnya diperoleh data secara statistik bahwa Manajemen Keuangan berpengaruh positif dengan tingkat signifikan 95% (t_{hitung} 3.651 dengan t_{tabel} 1.675 dengan nilai probability 0.0006) terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu tolak H_0 dan terima H_1 , karena Manajemen Keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dengan demikian membuktikan Hipotesis 2 diterima. Artinya, keterlibatan pegawai dalam penyusunan anggaran akan memberikan pemahaman kepadanya tentang pentingnya penyusunan anggaran dalam kegiatan. Dengan demikian akan memberikan kontribusi yang baik pula dalam melayani masyarakat, sehingga akan meningkatkan kinerja pelayanan secara menyeluruh yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anthony dan Govindrajan (2003), yang menjelaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi. Keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran khususnya dalam anggaran sektor publik diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja

pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan setiap personil yang kompeten pada setiap level organisasi dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dalam konteks manajemen keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja.

4.2.7. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah

Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) bahwa satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang dimaksud dalam penyusunan RKA-SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Untuk dapat menyusun anggaran Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan analisis kinerja program.

Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik menggunakan *Method Least Squares* bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dengan tingkat signifikan 95% (t_{hitung} 3.066 dengan t_{tabel} 1.675 dengan nilai probabilitas 0.0035) terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu tolak H_0 dan terima H_1 karena Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis Partisipasi Anggaran baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muthaher (2007) menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil Hipotesis 1, 2, 3 dan 4 di atas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Sistem Akuntansi, Manajemen Keuangan, dan Partisipasi Anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Artinya Pemahaman Sistem Akuntansi, Manajemen Keuangan, dan Partisipasi Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan pada bab terdahulu, maka pada bab ini dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut:

3.1. Kesimpulan

- 1) Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 2) Manajemen Keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 3) Partisipasi Anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 4) Pemahaman Sistem Akuntansi, Manajemen Keuangan, dan Partisipasi Anggaran secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.2. Saran

Dalam penelitian ini dapat penulis berikan beberapa saran demi perbaikan Kinerja SKPD yang berhubungan dengan pemahaman laporan keuangan, sebagai berikut:

- 1) Diperlukan adanya Pendidikan dan Pelatihan di bidang keuangan, serta pembinaan secara kontinue terhadap pegawai oleh bagian administrasi pembangunan dan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo agar PNS lebih menguasai tentang Sistem Akuntansi Keuangan, demi tercapainya Kinerja SKPD yang lebih baik dan berkelanjutan.

- 2) Sistem pelaporan keuangan yang sudah diterapkan perlu ditinjau kembali dalam rangka menunjang tercapainya sistem kerja dan kinerja yang baik sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 3) Untuk memperoleh Kinerja yang baik keterlibatan seluruh pegawai dalam Partisipasi Anggaran juga perlu disesuaikan untuk menjalankan rutinitas sesuai dengan sistem keuangan yang digunakan.
- 4) Agar Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, untuk itu perlu dikaji/ditinjau kembali tentang Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Manajemen Keuangan, dan Partisipasi Anggaran, karena sesuai dengan hasil penelitian variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap Kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Algiari. (1997). *Analisi Regresi : Teori , Kasus dan Solusinya*. BPFE Yogyakarta.
- Anthony, N. Robert, and David W. Younget. (2003). *Management Control in Nonprofit Organizations*. Sevent Edition. New York: McGraw-Hill Companies.
- Baridwan, Zaki. (2004). *Prosiding Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. UAD Pres. Yogyakarta.
- Bookholdt, L.J.(1996). *Accounting Information Systems-Transaction Processing and Controls*. Fourth Edition. Irwin
- Case, E. Fred. (2002). The Budget as a Measure of the Federal Urban Housing Program. *The Jurnal of Finance*. Volume 6.
- Collier, M.Paull. (1997). *The Power of Accounting, A Fierd Study of Local Financial Management in a Police Force*. Aston Business School Research Institute.
- Dajan. Anton. (1997). *Pengantar Metode Penelitian*. LP3ES. Jakarta
- Edwar, 1. Mazur. (1992). The Vision for Improving Federal Fiancial Management, *The Government Accountants Journal*. Vol.41. No.3, fall.
- Freeman, 1. Robert and Craig D. Shoulders. (2004). *Govermental and nonprofit Accounting*. Pearson Education.Inc. New Jersey.
- Gujarati, Damonar dan Sumamo Zain, 2002, *Ekonometrika Dasar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul.(2005). *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keungan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Hay E. Leon, and John H. Engstrom. (1997). *Essentials of Accounting For Governmental and Not-for-profit Organizations*. Irwin. Inc.
- Herbert, Leo. Larry N. Killough. And Alan 'Nalter. (1984). *Governmental Accounting and Control*. Cole Publishing Company.

- Hogye, Mihaly.(2002). *Local Government Budgeting Local Government and Publik Service Reform Initiative.*
- John, W Dickhaut dan Kevin A.McCabe.(1997). The Behavioral Foundations of Stewardship Accounting and a Proposed Program of Research: *What is Accountability.* Behavioral Research in Annconting. Vol 9.
- Kimsean, Yin, Yermias dan Subarsono.(2004). Analisis Kinerja Pelayanan Publik Pada unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Yogyakarta. SOSIOSAINS.17(3). Yogyakarta.
- Kearns, S. Paula. -1993. The Determinants of State Budget Periodicity: *An Emperical Analysis.* Publik Budgeting & Finance. Vol.13 No.1.
- Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik Yogyakarta.* Pembaruan.
- Laurensius, Ferry. S dan Abdul Halim Pengaruh.(2005). Faktor-Faktor Rasional, Politik dan Kultur Organisasi terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi*, 8 September. Solo.
- Lin, Wenshan, and K. K. Raman. 1998. The housing value-relevance of govermental accounting information. *Journal of Accounting and Publik Policy* 17.
- Lin, Jun.Z. (1993). Harmonization of Financial Reporting by Governments in Canada, *Financial Accountability & Management.* 9 (1). February.
- Louise, Kloot.1999. Performance measurement and accountability in Victorian local goverment. *The International Juornal of Publik Sector Management.* Vol 12
- Mahmudi dan Mardiasmo. 2Q04. Local Government Performance Measurement In The Era Of Local Autonomy: *The Case Ofsleman Regency Yogyakarta.* SOSIOSAINS. 17 (1). Hal 117-133.
- Miah, Z. N dan L.Mia. (1996).Decentralization, Accounting. Controls and Performance of Government Organizsations: A New Zeland Emperical Study. *Financail Accountability & Management.* 12 (3), August.

- Mardiasmo, (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. AND!. Yogyakarta.
- M Safar, Nasir, Suharyani, Fathur R, Dewi A dan Khusnul H.2004. Prosiding Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. UAD Press. Yogyakarta.
- Mwita, Isaac John. (2000) Performance management model A System-based approach to publik service quality. *The International Journal of Publik Sector Management*. Vol.13
- Neu, Dean. (2000). Accounting and Accountability Relations: *Colonization, Genocide and Canada's First Nations, Accounting, Auditing & Accountability*. Journal, V 01.13. No.3
- Newkrik, E. Thomas 1986. Improving Financial Information System in Local Government. *Management Accounting*.
- Nur, Nunuy Afiah. (2004). Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, serta Kualitas Informasi Keuangan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Pamunkas, Bambang. (2005). Pengaruh Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Penerapan Akuntansi Keuangan Sektor Publik dan Penerapan Pengmi'asan Terhadap Kulaitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disertai Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Peterson, B. Stephen. (1994). Budgeting in Kenya:c Prakte and Prescription, *Publik Budgeting & Finance*. Vol. 14, No.3, Fall.
- Pocock, M.A and A.H. Taylor.1981. Handbook of Financial Planning and Control. Gower Publishing Company.
- Purdy, E. Derek. (1993). Accounting, Controls, Change and The Perceptions of managers: A Longitudinal Study of Ward Units in A Teaching Hospital. *Financial Accountability & Management*, 9 (1), February.

- Reck L. Jacqueline. (2001). The Usefulness of Financial and NonFinancial Performance Information in Resource Allcation Decisions, *Jaournal of Accounting and Publik Policy*. 20.
- Depdagri, (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- _____ (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- _____. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____ (2002). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ririn Dwinasari dan Mardiasno. (2004). The Effect Of Relationship Between Budgetary Participation And Decentralization Structure On Managerial Performance As Intervening Variable. (*Empirical Study On Municipality And Rgencies in Yogyakarta Province*). *SOSIOSAINS*, 17 (4).
- Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta
- Sugiyono, (2007). Metode Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- Tjandra, W Riawan dkk. (2005). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Pembaruan. Jakarta.
- Thoha,Miftah. (2000). Perspektif Perilaku Birokrasi: *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Aministrasi Negara*. Jilid II. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Thompson, Jocelyn. (2003). Accountability and Audit. *International Journal of Government Auditing*. Vol.30. No.2.
- Tuasikal, Askam. (2006).Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Manajemen Keuangan Terhadap Kinerja Unit Stuan Kerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Ulum, Ihya. (2004). Akuntansi Sektor Publik: *Sebuah Pengantar*. Universitas Muhammadiyah. Malang.

Sekaran, Uma. (1984). *Research, Methods for Business*, Southern Illinois Universitas at Carbondale.

Wulan, Iyhyg dan Indra Bastian. (2005). *Rancangan Sistem Kesejahteraan Sosial (Social security system) di Indonesia dalam Perspektif Akuntansi 9 Studi Empiris Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Solo. Simposium Nasional Akuntansi 8, September.

Zimmerman, Jerold. (2000), *Accounting for Decision Making and Conto!*. Third Edition. McGraw-Hill Higher Companies.

Zusianto, Herry. (2004). *Permasalahan Implementasi Indikator Kinerja di Kota Yogyakarta*. M. Safar dkk (Penyunting). *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. UAD Press. Yogyakarta.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Kepada,
Yth. Bapak / Ibu
Di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bungo
Di – Muara Bungo

Dengan hormat,

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini, demi melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian pendidikan Magister yang sedang saya tempuh, dengan judul tesis **“Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan, manajemen keuangan dan partisipasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (*studi pada Sekretariat daerah Kabupaten Bungo*)”**.

Demikian dan terima kasih.

Hormat saya,

SUPRIYADI

Lampiran 1 : Kuesioner**KUESIONER****A. Karakteristik Responden**

Nama Instansi :

Nama Responden :

Latar Pendidikan :

Jabatan Responden :

Lama Bekerja :

Kursus/Diklat di bidang akuntansi dan keuangan:

1.
2.
3.

B. Kuesioner

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan cara disilang (X) atau lingkaran pada angka 1 s/d 5 di kolom yang disediakan. Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 : Sangat Tidak Paham (STP)
 Skor 2 : Tidak Paham (TP)
 Skor 3 : Netral (N)
 Skor 4 : Paham (P)
 Skor 5 : Sangat Paham (SP)

No.	Uraian	STP	TP	N	P	SP
I	Kinerja SKPD					
1	Menentukan tujuan, kebijakan dan tindakan/pelaksanaan, penjadwalan kerja, penganggaran, merencanakan prosedur dan pemrograman					
2	Tukar menukar informasi dengan orang lain di bagian organisasi lain untuk mengaitkan dan menyesuaikan program; memberitahu SKPD lain					
3	Menilai dan mengukur proposal, kinerja yang diamati atau dilaporkan: penilaian pegawai, penilaian catatan, penilaian catatan hasil, penilaian					

No.	Uraian	STP	TP	N	P	SP
	laporan keuangan					
4	Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan Bapak/Ibu: membimbing, melatih dan menjelaskan peraturan kerja pada bawahan; memberikan tugas pekerjaan dan menangani keluhan					
5	Mempertahankan angkatan kerja di bagian Bapak/Ibu: merekrut, mewawancarai dan memilih pegawai baru; menempatkan, mempromosikan dan memutasi pegawai					
II	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah					
1	Memahami sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas					
2	Memahami sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas					
3	Memahami sistem dan prosedur akuntansi aset tetap					
4	Memahami sistem akuntansi selain kas					
5	Memahami sistem pencatatan double entry					
6	Memahami prosedur yang harus dilakukan untuk menjembatani kas basis ke akrual basis					
III	Managemen Keuangan Daerah					
1	RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja					
2	Penyusunan RKA SKPD berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis					

No.	Uraian	STP	TP	N	P	SP
	standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal					
3	Pelaksanaan DPA SKPD sesuai indikator kinerja dan capaian atau target kinerja					
4	Penatausahaan pendapatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011					
5	Penatausahaan belanja telah sesuai dengan penggunaan dokumen SPP, SPM, SP2D untuk UP/GU/TU/LS					
6	SKPD harus membuat Laporan Keuangan Semester I dan semester II, serta laporan keuangan SKPD merupakan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran					
7	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan SKPD					

Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran

- Seberapa jauh keterlibatan Saudara dalam penyusunan anggaran kegiatan di bidang tanggung jawab Saudara?
 - Tidak satupun anggaran kegiatan (1)
 - Satu anggaran kegiatan (2)
 - 2-3 anggaran kegiatan (3)
 - Beberapa anggaran kegiatan (4)
 - Semua anggaran kegiatan (5)

- Seberapa logis/masuk akal nya alasan yang diberikan oleh atasan Saudara dalam merevisi anggaran kegiatan Saudara?
 - Sangat Tidak Logis (1)
 - Tidak Logis (2)
 - Ragu- ragu (3)
 - Logis (4)
 - Sangat Logis (5)

3. Seberapa sering Saudara memberi pendapat atau opini tentang anggaran kegiatan kepada atasan Saudara?
- Sangat Tidak Pernah (1)
 - Tidak Pernah (2)
 - Kadang-kadang (3)
 - Sering (4)
 - Sangat Sering (5)
4. Seberapa jauh pengaruh Saudara terhadap anggaran kegiatan akhir bidang tanggung jawab Saudara?
- Sangat Tidak Ada Pengaruh (1)
 - Tidak Berpengaruh (2)
 - Kadang-kadang (3)
 - Berpengaruh (4)
 - Sangat Berpengaruh (5)
5. Seberapa penting kontribusi Saudara terhadap proses penyusunan anggaran?
- Sangat Tidak Penting (1)
 - Tidak Penting (2)
 - Kadang-kadang (3)
 - Penting (4)
 - Sangat Penting (5)
6. Seberapa sering Saudara diminta pendapat atau opini ketika anggaran kegiatan disusun oleh atasan Saudara?
- Sangat Tidak Pernah (1)
 - Tidak Pernah (2)
 - Kadang-kadang (3)
 - Sering (4)
 - Sangat Sering (5)

Lampiran 2 : Tabulasi data

Responden	(Y) Kinerja						(X1) Sistem Akuntansi Keuangan							(X2) Manajemen Keuangan							(X3) Partisipasi Anggaran							
	Y-1	Y-2	Y-3	Y-4	Y-5	Rata2	X1-1	X1-2	X1-3	X1-4	X1-5	X1-6	Rata2	X2-1	X2-2	X2-3	X2-4	X2-5	X2-6	X2-7	Rata2	X3-1	X3-2	X3-3	X3-4	X3-5	X3-6	Rata2
1	5.65	5.65	3.20	5.65	3.20	4.67	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.77	5.65	5.65	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	5.28	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	3.20	4.80
2	5.65	5.65	3.20	5.65	3.20	4.67	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.77	3.20	5.65	5.65	5.65	5.65	4.33	5.65	5.12	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	3.20	4.80
3	5.65	5.65	3.20	5.65	3.20	4.67	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.77	5.65	5.65	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	5.28	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	3.20	4.80
4	5.65	5.65	3.20	5.65	3.20	4.67	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.77	5.65	5.65	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	5.28	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	3.20	4.80
5	3.20	5.65	5.65	3.20	5.65	4.67	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.77	5.65	5.65	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	5.28	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	3.20	4.80
6	5.65	3.20	4.33	2.27	4.33	3.96	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	2.27	4.43	5.65	4.33	5.65	4.33	4.33	5.65	4.33	4.90	4.33	3.20	4.33	4.33	4.33	5.65	4.36
7	3.20	4.33	2.27	4.33	2.27	3.28	4.33	5.65	4.33	2.27	2.27	2.27	3.52	2.27	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.33	3.87	3.20	4.33	3.20	2.27	4.33	3.20	3.42
8	4.33	4.33	2.27	4.33	2.27	3.50	5.65	5.65	2.27	4.33	2.27	2.27	3.74	4.33	4.33	4.33	3.20	2.27	4.33	4.33	3.87	4.33	4.33	3.20	3.20	3.20	3.20	3.58
9	4.33	4.33	2.27	5.65	3.20	3.96	3.20	5.65	4.33	3.20	2.27	2.27	3.49	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	2.27	4.33	3.20	4.33	4.33	4.33	3.80
10	3.20	4.33	2.27	4.33	2.27	3.28	4.33	5.65	3.20	2.27	2.27	2.27	3.33	2.27	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.33	3.87	4.33	4.33	3.20	3.20	3.20	3.20	3.58
11	4.33	4.33	3.20	3.20	3.20	3.65	4.33	4.33	4.33	4.33	3.20	3.20	3.95	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	4.33	4.52	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	3.20	3.95
12	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	4.33	4.33	3.20	3.20	3.20	3.20	3.58	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	3.20	4.33	4.01	4.33	4.33	4.33	3.20	3.20	4.33	3.95
13	4.33	3.20	2.27	5.65	4.33	3.96	3.20	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	3.95	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	5.65	4.33	4.36	
14	4.33	3.20	3.20	4.33	5.65	4.14	4.33	4.33	4.33	3.20	1.00	3.20	3.40	5.65	5.65	3.20	5.65	5.65	3.20	5.65	4.95	5.65	4.33	5.65	4.33	5.65	5.65	5.21
15	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.10	3.20	3.20	4.33	4.33	3.20	2.27	3.42	4.33	5.65	4.33	4.33	5.65	4.33	4.33	4.71	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.77
16	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.39	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	5.65	4.33	5.65	5.21
17	3.20	2.27	2.27	2.27	2.27	2.45	3.20	3.20	2.27	2.27	2.27	2.27	2.58	4.33	3.20	3.20	2.27	3.20	3.20	3.20	3.23	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
18	3.20	3.20	3.20	4.33	2.27	3.24	4.33	5.65	4.33	2.27	2.27	2.27	3.52	3.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.17	4.33	4.33	3.20	4.33	3.20	4.33	3.95

19	4.33	4.33	3.20	5.65	3.20	4.14	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	5.65	3.20	3.20	5.65	5.65	4.95	5.65	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.36	
20	4.33	3.20	2.27	4.33	3.20	3.47	4.33	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.14	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	4.33	4.33	3.20	3.20	4.17	
21	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.10	5.65	5.65	4.33	3.20	3.20	3.20	4.21	5.65	5.65	3.20	5.65	4.33	5.65	5.65	5.12	5.65	4.33	3.20	4.33	5.65	3.20	4.40	
22	3.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.10	5.65	5.65	4.33	3.20	3.20	3.20	4.21	5.65	5.65	5.65	3.20	5.65	3.20	5.65	4.95	4.33	3.20	3.20	3.20	4.33	4.33	3.77	
23	5.65	5.65	5.65	5.65	4.33	5.39	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	4.33	4.33	5.65	5.21
24	5.65	5.65	4.33	5.65	4.33	5.13	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.77	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.55
25	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	4.60	4.33	4.33	4.33	4.33	3.20	3.20	3.95	4.33	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	5.65	4.90	5.65	4.33	5.65	4.33	4.33	5.65	4.99	
26	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.10	5.65	4.33	3.20	3.20	4.33	4.33	4.17	4.33	5.65	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.36	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.55	
27	5.65	4.33	4.33	5.65	4.33	4.86	5.65	5.65	4.33	5.65	4.33	4.33	4.99	3.20	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	4.33	5.12	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	5.65	5.21	
28	5.65	5.65	4.33	5.65	4.33	5.13	5.65	5.65	5.65	4.33	5.65	4.33	5.21	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	4.33	4.33	5.65	5.65	4.33	4.99	
29	4.33	4.33	4.33	3.20	2.27	3.69	4.33	4.33	4.33	3.20	3.20	4.33	3.95	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	
30	5.65	5.65	4.33	5.65	4.33	5.13	5.65	5.65	4.33	3.20	3.20	3.20	4.21	4.33	5.65	5.65	4.33	4.33	5.65	4.33	4.90	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.55	
31	3.20	3.20	4.33	4.33	4.33	3.88	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.71	5.65	4.33	3.20	4.33	4.33	4.33	4.36	
32	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.77	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.52	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	
33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	5.65	5.65	5.65	5.65	5.43	4.33	5.65	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.90	4.33	5.65	5.65	5.65	4.33	4.33	4.99	
34	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	4.33	5.65	4.33	4.33	4.71	4.33	5.65	4.33	4.33	5.65	4.33	4.77	
35	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.55	4.33	4.33	5.65	4.33	5.65	4.33	4.33	4.71	4.33	4.33	5.65	4.33	5.65	4.33	4.77	
36	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.55	4.33	4.33	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.28	4.33	4.33	5.65	5.65	5.65	5.65	5.21	
37	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	5.65	4.33	4.33	3.20	4.58	5.65	5.65	5.65	4.33	3.20	5.65	5.65	5.12	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	
38	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65
39	4.33	2.27	4.33	4.33	2.27	3.50	4.33	3.20	4.33	3.20	3.20	3.20	3.58	4.33	5.65	4.33	5.65	4.33	5.65	4.33	4.90	4.33	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.55	
40																													

	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	3.20	4.33	4.33	4.33	4.36	4.33	5.65	4.33	4.33	5.65	4.33	4.33	4.71	4.33	5.65	4.33	4.33	5.65	4.33	4.77
41	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	4.33	3.20	4.33	2.27	5.65	5.65	4.24	3.20	5.65	5.65	3.20	4.33	4.33	4.33	4.39	3.20	5.65	5.65	3.20	4.33	4.33	4.40
42	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	4.60	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.77	5.65	5.65	5.65	4.33	3.20	5.65	5.65	5.12	5.65	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	4.77
43	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.10	4.33	5.65	4.33	4.33	3.20	3.20	4.17	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
44	5.65	5.65	4.33	4.33	3.20	4.63	5.65	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.77	4.33	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.52	4.33	5.65	4.33	4.33	4.33	4.33	4.55
45	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	4.33	4.33	3.20	3.20	4.33	3.20	3.77	4.33	4.33	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.52	4.33	4.33	3.20	3.20	3.20	3.20	3.58
46	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	4.33	4.33	4.33	3.20	4.36	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	5.65	4.90	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
47	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65	5.65
48	4.33	4.33	3.20	3.20	4.33	3.88	3.20	3.20	5.65	3.20	4.33	4.33	3.99	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.33	4.33	4.17	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.33	4.14
49	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.10	4.33	5.65	4.33	4.33	3.20	3.20	4.17	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	4.33	4.71	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	4.77
50	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.10	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.33	4.17	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.14
51	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.10	4.33	5.65	4.33	3.20	4.33	4.33	4.36	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	4.33	4.71	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	4.77
52	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.10	4.33	5.65	3.20	4.33	3.20	4.33	4.17	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.17	4.33	4.33	4.33	4.33	5.65	5.65	4.77
53	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.10	4.33	5.65	3.20	5.65	3.20	4.33	4.40	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.33	4.17	4.33	4.33	4.33	3.20	4.33	4.33	4.14

Obs	Y	X1	X2	X3
1	4.67	4.77	5.28	4.80
2	4.67	4.77	5.12	4.80
3	4.67	4.77	5.28	4.80
4	4.67	4.77	5.28	4.80
5	4.67	4.77	5.28	4.80
6	3.96	4.43	4.90	4.36
7	3.28	3.52	3.87	3.42
8	3.50	3.74	3.87	3.58
9	3.96	3.49	4.33	3.80
10	3.28	3.33	3.87	3.58
11	3.65	3.95	4.52	3.95
12	3.20	3.58	4.01	3.95
13	3.96	3.95	4.33	4.36
14	4.14	3.40	4.95	5.21
15	4.10	3.42	4.71	4.77
16	4.33	3.39	4.33	5.21
17	2.45	2.58	3.23	3.20
18	3.24	3.52	4.17	3.95
19	4.14	4.33	4.95	4.36
20	3.47	4.14	4.33	4.17
21	4.10	4.21	5.12	4.40
22	4.10	4.21	4.95	3.77
23	5.39	4.33	5.65	5.21
24	5.13	4.77	5.65	4.55
25	4.60	3.95	4.90	4.99
26	4.10	4.17	4.36	4.55
27	4.86	4.99	5.12	5.21
28	5.13	5.21	5.65	4.99

Obs	Y	X1	X2	X3
29	3.69	3.95	4.33	4.33
30	5.13	4.21	4.90	4.55
31	3.88	4.33	4.71	4.36
32	4.33	4.77	4.52	4.33
33	4.33	5.43	4.90	4.99
34	4.33	4.33	4.71	4.77
35	4.33	4.55	4.71	4.77
36	4.33	4.55	5.28	5.21
37	4.33	4.58	5.12	4.33
38	5.65	5.65	5.65	5.65
39	3.50	3.58	4.90	4.55
40	4.33	4.36	4.71	4.77
41	3.20	4.24	4.39	4.40
42	4.60	4.77	5.12	4.77
43	4.10	4.17	4.33	4.33
44	4.63	4.77	4.52	4.55
45	3.20	3.77	3.52	3.58
46	4.33	4.36	4.90	4.33
47	5.65	5.65	5.65	5.65
48	3.88	3.99	4.17	4.14
49	4.10	4.17	4.71	4.77
50	4.10	4.33	4.17	4.14
51	4.10	4.36	4.71	4.77
52	4.10	4.17	4.17	4.77
53	4.10	4.40	4.17	4.14

Lampiran 3 : printout hasil EViews

HASIL UJI VALIDITAS

Correlations

	Y-1	Y-2	Y-3	Y-4	Y-5	Total
Y-1 Pearson Correlation	1	.644**	.333*	.538**	.272*	.775**
Sig. (2-tailed)		.000	.015	.000	.049	.000
N	53	53	53	53	53	53
Y-2 Pearson Correlation	.644**	1	.411**	.545**	.312*	.813**
Sig. (2-tailed)	.000		.002	.000	.023	.000
N	53	53	53	53	53	53
Y-3 Pearson Correlation	.333*	.411**	1	.074	.649**	.691**
Sig. (2-tailed)	.015	.002		.597	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53
Y-4 Pearson Correlation	.538**	.545**	.074	1	.137	.641**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.597		.327	.000
N	53	53	53	53	53	53
Y-5 Pearson Correlation	.272*	.312*	.649**	.137	1	.662**
Sig. (2-tailed)	.049	.023	.000	.327		.000
N	53	53	53	53	53	53
Total Pearson Correlation	.775**	.813**	.691**	.641**	.662**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X ¹ -1	X ₁ -2	X ₁ -3	X ₁ -4	X ₁ -5	X ₁ -6	Total
X ₁ -1	Pearson Correlation	1	.512**	.195	.431**	.419**	.341*	.699**
	Sig. (2-tailed)		.000	.163	.001	.002	.013	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -2	Pearson Correlation	.512**	1	.094	.282*	.026	-.007	.450**
	Sig. (2-tailed)	.000		.503	.041	.854	.963	.001
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -3	Pearson Correlation	.195	.094	1	.354**	.539**	.440**	.636**
	Sig. (2-tailed)	.163	.503		.009	.000	.001	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -4	Pearson Correlation	.431**	.282*	.354**	1	.512**	.518**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.001	.041	.009		.000	.000	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -5	Pearson Correlation	.419**	.026	.539**	.512**	1	.799**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.002	.854	.000	.000		.000	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -6	Pearson Correlation	.341*	-.007	.440**	.518**	.799**	1	.761**
	Sig. (2-tailed)	.013	.963	.001	.000	.000		.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Total	Pearson Correlation	.699**	.450**	.636**	.756**	.810**	.761**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	53	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X ¹ -1	X ₁ -2	X ₁ -3	X ₁ -4	X ₁ -5	X ₁ -6	Total
X ₁ -1	Pearson Correlation	1	.512**	.195	.431**	.419**	.341*	.699**
	Sig. (2-tailed)		.000	.163	.001	.002	.013	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -2	Pearson Correlation	.512**	1	.094	.282*	.026	-.007	.450**
	Sig. (2-tailed)	.000		.503	.041	.854	.963	.001
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -3	Pearson Correlation	.195	.094	1	.354**	.539**	.440**	.636**
	Sig. (2-tailed)	.163	.503		.009	.000	.001	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -4	Pearson Correlation	.431**	.282*	.354**	1	.512**	.518**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.001	.041	.009		.000	.000	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -5	Pearson Correlation	.419**	.026	.539**	.512**	1	.799**	.810**
	Sig. (2-tailed)	.002	.854	.000	.000		.000	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X ₁ -6	Pearson Correlation	.341*	-.007	.440**	.518**	.799**	1	.761**
	Sig. (2-tailed)	.013	.963	.001	.000	.000		.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Total	Pearson Correlation	.699**	.450**	.636**	.756**	.810**	.761**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	53	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	X ₂ -1	X ₂ -2	X ₂ -3	X ₂ -4	X ₂ -5	X ₂ -6	X ₂ -7	Total
X ₂ -1 Pearson Correlation	1	.427**	.296*	.283*	.028	.394**	.589**	.621**
Sig. (2-tailed)		.001	.031	.040	.842	.003	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -2 Pearson Correlation	.427**	1	.508**	.473**	.213	.415**	.595**	.743**
Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.125	.002	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -3 Pearson Correlation	.296*	.508**	1	.317*	.193	.534**	.539**	.697**
Sig. (2-tailed)	.031	.000		.021	.166	.000	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -4 Pearson Correlation	.283*	.473**	.317*	1	.520**	.467**	.471**	.734**
Sig. (2-tailed)	.040	.000	.021		.000	.000	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -5 Pearson Correlation	.028	.213	.193	.520**	1	.175	.287*	.505**
Sig. (2-tailed)	.842	.125	.166	.000		.210	.037	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -6 Pearson Correlation	.394**	.415**	.534**	.467**	.175	1	.528**	.726**
Sig. (2-tailed)	.003	.002	.000	.000	.210		.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
X ₂ -7 Pearson Correlation	.589**	.595**	.539**	.471**	.287*	.528**	1	.823**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.037	.000		.000
N	53	53	53	53	53	53	53	53
Total Pearson Correlation	.621**	.743**	.697**	.734**	.505**	.726**	.823**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	53	53	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	X ₃ -1	X ₃ -2	X ₃ -3	X ₃ -4	X ₃ -5	X ₃ -6	total
X ₃ -1 Pearson Correlation	1	.059	.293*	.543**	.317*	.076	.576**
Sig. (2-tailed)		.675	.033	.000	.021	.587	.000
N	53	53	53	53	53	53	53
X ₃ -2 Pearson Correlation	.059	1	.502**	.286*	.197	.219	.551**
Sig. (2-tailed)	.675		.000	.038	.157	.114	.000
N	53	53	53	53	53	53	53
X ₃ -3 Pearson Correlation	.293*	.502**	1	.464**	.359**	.575**	.799**
Sig. (2-tailed)	.033	.000		.000	.008	.000	.000
N	53	53	53	53	53	53	53
X ₃ -4 Pearson Correlation	.543**	.286*	.464**	1	.594**	.223	.782**
Sig. (2-tailed)	.000	.038	.000		.000	.108	.000
N	53	53	53	53	53	53	53
X ₃ -5 Pearson Correlation	.317*	.197	.359**	.594**	1	.268	.689**
Sig. (2-tailed)	.021	.157	.008	.000		.052	.000
N	53	53	53	53	53	53	53
X ₃ -6 Pearson Correlation	.076	.219	.575**	.223	.268	1	.596**
Sig. (2-tailed)	.587	.114	.000	.108	.052		.000
N	53	53	53	53	53	53	53
total Pearson Correlation	.576**	.551**	.799**	.782**	.689**	.596**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	53	53	53	53	53	53	53

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

HASIL UJI RELIABILITAS

Reliabilitas Variabel Y (Kinerja SKPD)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.762	5

Reliabilitas Variabel X₁ (Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.778	6

Reliabilitas Variabel X₂ (Managemen Keuangan Daerah)

Scale: ALL VARIABLE

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.817	7

Reliabilitas Variabel X₃ (Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran)

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	53	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	53	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	6

Hasil Olah Data Menggunakan Eviws

	Y	X1	X2
Mean	4.182453	4.262264	4.697736
Median	4.100000	4.330000	4.710000
Maximum	5.650000	5.650000	5.650000
Minimum	2.450000	2.580000	3.230000
Std. Dev.	0.645007	0.602998	0.557041
Skewness	0.005464	-0.031226	-0.242727
Kurtosis	3.305997	3.403958	2.765866
Jarque-Bera	0.207039	0.368974	0.641488
Probability	0.901658	0.831531	0.725609
Sum	221.6700	225.9000	248.9800
Sum Sq. Dev.	21.63378	18.90753	16.13533
Observations	53	53	53

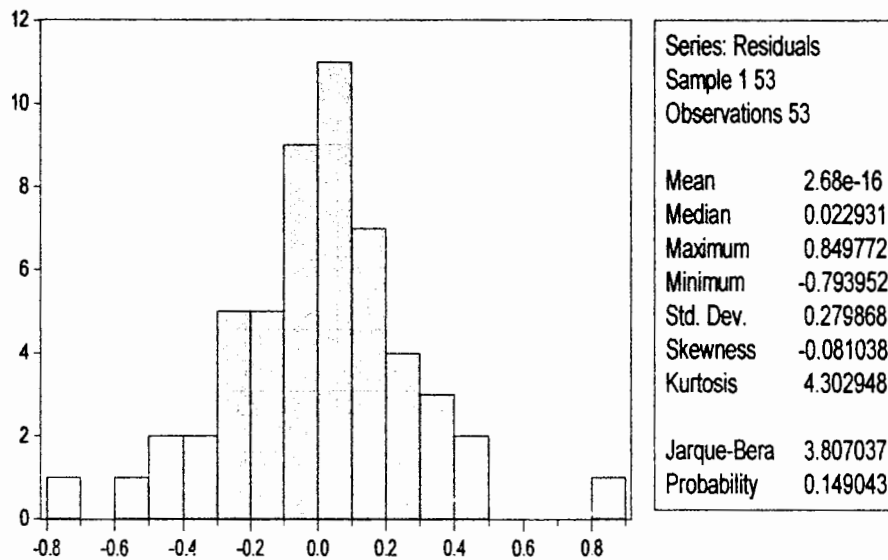
HASIL PERHITUNGAN REGRESI BERGANDA

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 10/21/14 Time: 17:15
 Sample: 1 53
 Included observations: 53

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.978528	0.360987	-2.710703	0.0092
X1	0.306841	0.098684	3.109333	0.0031
X2	0.472658	0.129451	3.651253	0.0006
X3	0.362841	0.118343	3.066010	0.0035
R-squared	0.811732	Mean dependent var		4.182453
Adjusted R-squared	0.800206	S.D. dependent var		0.645007
S.E. of regression	0.288308	Akaike info criterion		0.422895
Sum squared resid	4.072944	Schwarz criterion		0.571596
Log likelihood	-7.206708	Hannan-Quinn criter.		0.480078
F-statistic	70.42252	Durbin-Watson stat		1.962022
Prob(F-statistic)	0.000000			

PENGUJIAN MODEL

NORMALITY TEST



LINEARITY TEST

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: Y C X1 X2 X3
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	Df	Probability
t-statistic	0.750614	48	0.4565
F-statistic	0.563421	(1, 48)	0.4565
Likelihood ratio	0.618488	1	0.4316

F-test summary:

	Sum of Sq.	Df	Mean Squares
Test SSR	0.047253	1	0.047253
Restricted SSR	4.072944	49	0.083121
Unrestricted SSR	4.025691	48	0.083869
Unrestricted SSR	4.025691	48	0.083869

LR test summary:

	Value	Df
Restricted LogL	-7.206708	49
Unrestricted LogL	-6.897464	48

Unrestricted Test Equation:
 Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 10/21/14 Time: 17:23
 Sample: 1 53
 Included observations: 53

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.446812	1.933210	0.231125	0.8182
X1	0.150631	0.230512	0.653465	0.5166
X2	0.252454	0.320892	0.786724	0.4353
X3	0.193418	0.255102	0.758198	0.4520
FITTED^2	0.058196	0.077531	0.750614	0.4565
R-squared	0.813916	Mean dependent var		4.182453
Adjusted R-squared	0.798409	S.D. dependent var		0.645007
S.E. of regression	0.289601	Akaike info criterion		0.448961
Sum squared resid	4.025691	Schwarz criterion		0.634838
Log likelihood	-6.897464	Hannan-Quinn criter.		0.520440
F-statistic	52.48716	Durbin-Watson stat		1.977869
Prob(F-statistic)	0.000000			

MULTIKOLENEARITAS

	Y	X1	X2	X3
		0.7775863713	0.8510080267	0.7986999447
Y	1	956126	810679	419786
	0.7775863713		0.7323081372	0.6348744312
X1	956126	1	148922	726324
	0.8510080267	0.7323081372		0.7703861689
X2	810679	148922	1	441486
	0.7986999447	0.6348744312	0.7703861689	
X3	419786	726324	441486	1

HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.658482	Prob. F(9,43)	0.7409
Obs*R-squared	6.419769	Prob. Chi-Square(9)	0.6973
Scaled explained SS	9.062156	Prob. Chi-Square(9)	0.4316

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 10/21/14 Time: 17:21

Sample: 1 53

Included observations: 53

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.272653	1.187211	-1.071969	0.2897
X1	-0.064962	0.569441	-0.114080	0.9097
X1^2	0.074317	0.094664	0.785058	0.4367
X1*X2	-0.401064	0.220480	-1.819051	0.0759
X1*X3	0.272292	0.186134	1.462876	0.1508
X2	0.368342	0.796231	0.462607	0.6460
X2^2	0.190898	0.194999	0.978972	0.3331
X2*X3	-0.093950	0.238334	-0.394197	0.6954
X3	0.284664	0.898032	0.316987	0.7528
X3^2	-0.105950	0.130507	-0.811834	0.4214
R-squared	0.121128	Mean dependent var		0.076848
Adjusted R-squared	-0.062822	S.D. dependent var		0.141000
S.E. of regression	0.145362	Akaike info criterion		-0.850916
Sum squared resid	0.908591	Schwarz criterion		-0.479163
Log likelihood	32.54929	Hannan-Quinn criter.		-0.707958
F-statistic	0.658482	Durbin-Watson stat		2.252176
Prob(F-statistic)	0.740909			